

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. PENGANTAR.....	1
B. PENGERTIAN .....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
D. LANDASAN.....	3
E. SISTEMATIKA .....	5
BAB II. KONDISI UMUM.....	6
2.1. KONDISI SAAT INI.....	6
2.1.1. Pemerintahan dan Aparatur .....	7
2.1.2. Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban.....	8
2.1.3. Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama.....	10
2.1.4. Ekonomi .....	24
2.1.5. Sarana dan Prasarana .....	39
2.1.6. Wilayah dan Tata Ruang .....	46
2.1.7. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup .....	49
2.2. TANTANGAN.....	55
2.2.1. Pemerintah dan Aparatur .....	55
2.2.2. Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban.....	60
2.2.3. Sosial, Budaya dan Kehidupan Beragama.....	63
2.2.4. Ekonomi .....	74
2.2.5. Sarana dan Prasarana .....	81
2.2.6. Wilayah dan tata Ruang.....	86
2.2.7. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup .....	88
2.3. MODAL DASAR.....	92

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005–2025 .....	94
3.1. VISI .....	94
3.2. MISI.....	96
BAB IV. ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS .....	100
PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005–2025.....	100
4.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN .....	100
4.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025.....	107
4.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025.....	153
4.3.1.RPJMD I (Tahun 2005-2010).....	154
4.3.2.RPJMD II (Tahun 2010-2015) .....	162
4.3.3.RPJMD III (Tahun 2015-2020) .....	172
4.3.4.RPJMD IV (Tahun 2020-2025).....	181
BAB V. PENUTUP.....	191

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PENGANTAR**

Pembangunan merupakan proses transformasi sosial dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat. Terus meningkatnya tantangan dan permasalahan pembangunan akibat dinamika kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi di satu pihak dan terbatasnya ketersediaan sumberdaya pembangunan di lain pihak, menyebabkan upaya pembangunan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat dicapai tujuan akhir dari pembangunan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya yang tersedia.

Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan maksud agar setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan memiliki benang merah dan memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan akhir atau visi pembangunan. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan merupakan panduan dan pedoman yang harus mampu memberi arah bagi pelaksanaan pembangunan sehingga akan dapat dicapai sasaran jangka pendek dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah yang kemudian secara bertahap dalam jangka panjang akan mengarah pada terwujudnya visi

pembangunan. Agar pembangunan betul-betul dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, maka dokumen perencanaan pembangunan disusun sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pembangunan.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (lima tahunan), dan jangka pendek (tahunan). Untuk mewujudkan sinergitas secara vertikal demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025 disusun dengan menyelaraskan pada RPJP Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, RPJP Kabupaten Purbalingga memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam jangka panjang.

## **B. PENGERTIAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk masa 20 tahun ke depan, yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJP Kabupaten Purbalingga sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu 20 tahun ke depan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan fihak-fihak lain dalam mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

## **D. LANDASAN**

Landasan idiil dari RPJP Kabupaten Purbalingga adalah Pancasila dan landasan konstitusional yang mendasari penyusunan RPJP Kabupaten Purbalingga adalah Undang-undang Dasar 1945

dengan mengacu pada RPJP Nasional. Sedang landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

## **E. SISTEMATIKA**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 disusun dalam tata urutan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi Umum
- Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025
- Bab IV : Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 –2025
- Bab V : Penutup.

## **BAB II.**

### **KONDISI UMUM**

#### **2.1. KONDISI SAAT INI**

Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan serta adanya pergeseran standar mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan, menyebabkan upaya pembangunan harus merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Proses pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang berlangsung selama ini, selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan berbagai permasalahan, baik yang mendasar maupun yang diakibatkan dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan lingkungan eksternal maupun internal ini menyebabkan perubahan standar indikator keberhasilan pembangunan serta meningkatnya kompleksitas permasalahan dan kebutuhan pembangunan.

Kondisi Kabupaten Purbalingga saat ini, yang mencerminkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai serta menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di masa mendatang antara lain adalah sebagai berikut :

### **2.1.1. Pemerintahan dan Aparatur**

1. Otonomi telah memunculkan sikap percaya diri perangkat daerah untuk menciptakan kreativitas, inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan; tumbuhnya kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan secara lebih tepat, cepat dan sesuai kebutuhan daerah; tumbuhnya upaya untuk memberikan pelayanan secara lebih baik/prima kepada masyarakat dan upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan lokal yang bersifat mendesak secara lebih cepat; serta semakin terdorongnya kehidupan sosial budaya masyarakat, ekonomi kerakyatan dan kehidupan demokrasi.
2. Kondisi umum pemerintahan dan aparatur di Kabupaten Purbalingga antara lain :
  - a. Kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa masih perlu dilakukan penyesuaian secara terus menerus sejalan dengan dinamika perkembangan, kebutuhan, dan peraturan perundang-undangan.
  - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum secara optimal menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

- c. Kualitas SDM aparatur masih perlu ditingkatkan sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan.
- d. Ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum masih relatif kurang.
- e. Fungsi kehumasan sebagai media komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat masih belum optimal.

### **2.1.2. Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban**

1. Di tengah semakin derasnya arus penetrasi budaya global dan semakin berkembangnya individualisme, materialisme, dan hedonisme yang mengabaikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kejujuran, kurangnya perhatian terhadap pembangunan kebudayaan dan pembinaan serta pengembangan nilai-nilai nasionalisme terutama pada kalangan anak-anak dan generasi muda telah menyebabkan semakin melemahnya semangat nasionalisme dan menurunnya kesadaran sosial serta semangat kesetiakawanan sosial.
2. Adanya indikasi kerawanan sosial yang muncul dalam bentuk konflik horisontal, meningkatnya gangguan keamanan, menurunnya ketertiban umum, dan meningkatnya kriminalitas menunjukkan adanya penurunan kesadaran sosial dan belum berkembangnya budaya hukum.

Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat akan mengganggu dan mengurangi intensitas aktivitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan.

3. Proses demokratisasi yang telah berlangsung seiring dengan bergulirnya reformasi politik telah membawa perubahan mendasar terhadap kehidupan politik nasional. Terbukanya kran demokrasi telah memungkinkan partisipasi dan peran politik rakyat yang semakin besar dalam segala jenjang. Namun demikian, kehidupan monolitik serta pembatasan peran dan kebebasan politik rakyat yang berlangsung selama era Orde Baru, membuat rakyat menjadi miskin pengalaman akan kehidupan berdemokrasi. Demokrasi dimaknai sekadar sebagai kebebasan mengaktualisasikan dan mengartikulasikan pendapat, gagasan, dan aspirasi.

Orientasi politik rakyat masih belum beranjak dari isu-isu primordial dan pilihan politik rakyat masih banyak ditentukan oleh lekatnya ikatan emosional dengan simbol-simbol. Euforia politik di tengah irasionalitas politik dan kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap etika politik sangat rawan menimbulkan friksi dan konflik.

### **2.1.3. Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama**

#### **A. Pendidikan**

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2003 mencapai 102,60 persen, dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 117,76 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 5,16 persen. APK SMP/MTs pada tahun 2003 sebesar 79,12 persen, dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 92,17 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 13,05 persen. Adapun APK SMA/MA/SMK pada tahun 2003 sebesar 32,62 persen dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 32,94 persen.
2. Pada tahun 2003 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Purbalingga adalah 6,1 tahun dan meningkat menjadi 6,3 tahun pada tahun 2004. Sedangkan angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2003 sebesar 90,5 persen yang pada tahun 2004 naik menjadi 92,4 persen.
3. Salah satu permasalahan menonjol di bidang pendidikan adalah masih terdapatnya kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, serta antara penduduk di perkotaan dan perdesaan. Data Susenas 2003 mengungkapkan bahwa faktor ekonomi

merupakan alasan utama (75,7 persen) anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah (67,0 persen) maupun karena harus bekerja (8,7 persen). Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Pada tahun 2003, pada saat APS penduduk 13-15 tahun dari kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 93,98 persen, APS kelompok 20 persen penduduk termiskin baru mencapai 67,23 persen. Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun dengan APS kelompok termiskin dan terkaya berturut-turut sebesar 28,52 persen dan 75,62 persen. Pada saat yang sama partisipasi pendidikan penduduk perdesaan lebih rendah dibanding penduduk perkotaan. Rata-rata APS penduduk perdesaan usia 13-15 tahun pada tahun 2003 adalah sebesar 75,6 persen sementara APS penduduk perkotaan untuk kelompok usia yang sama sudah mencapai 89,3 persen. Kesenjangan yang lebih nyata terlihat untuk kelompok usia 16-18 tahun yaitu dengan APS penduduk perkotaan sebesar 66,7 persen dan APS penduduk perdesaan sebesar 38,9 persen atau hanya separuh APS penduduk perkotaan.

4. Masih relatif rendahnya angka partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan SLTP dan yang lebih tinggi serta

masih terdapatnya kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, serta antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, menunjukkan bahwa upaya peningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi anak-anak keluarga kurang mampu dan bagi penduduk di wilayah perdesaan perlu terus ditingkatkan.

5. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai.
6. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana, sarana, dan tenaga pendidik disamping menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan juga menyebabkan relatif rendahnya kualitas pendidikan. Di samping itu, kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kualitas prasarana dan sarana, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, serta kualitas manajemen pendidikan.

Pada tahun 2004 sekitar 62,52 persen gedung SD/MI dan sekitar 12,07 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Hal tersebut selain berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar mengajar

juga berdampak pada kurangnya motivasi untuk sekolah. Pada saat yang sama masih banyak peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran.

Dilihat dari kualitas tenaga pendidik, belum semua pendidik memiliki kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Proporsi guru SD berpendidikan Diploma-2 ke atas sebesar 83,28 persen dan proporsi guru SLTP berpendidikan Diploma-3 ke atas sebesar 84,40 persen. Kondisi tersebut belum mencukupi untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

7. Hal lain yang terkait dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan adalah manajemen pendidikan yang belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pembangunan pendidikan di masing-masing wilayah sejak dalam penyusunan rencana, penentuan prioritas program, serta mobilisasi sumber daya untuk merealisasikan rencana. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah pula dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberikan wewenang yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki, termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan, diharapkan daerah dan satuan pendidikan

lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk, kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan.

8. Belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh daerah dengan acuan umum dari pemerintah pusat dan provinsi juga menjadi penyebab belum optimalnya desentralisasi pendidikan. Di samping itu, efektivitas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah belum optimal.

## **B. Kepemudaan dan Olah Raga**

1. Kecenderungan meningkatnya angka kenakalan remaja dan meningkatnya kecenderungan perilaku negatif yang dilakukan oleh anak-anak muda seperti konsumsi minuman keras dan narkoba, pencurian, perampokan, dan tindak kekerasan lainnya, menunjukkan adanya sesuatu yang luput dari perhatian dalam proses pembangunan selama ini. Gejala lain yang semakin kasat mata dalam kehidupan generasi muda adalah melunturnya semangat kebangsaan dan cinta Tanah Air serta melunturnya apresiasi terhadap budaya bangsa dan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya.

2. Kondisi keolahraagaan baik olahraga prestasi maupun olah raga masyarakat masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Secara umum, prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga masih belum menggembirakan, sekalipun pada tingkat regional. Dari sisi ketersediaan prasarana, sampai tahun 2004 Kabupaten Purbalingga belum memiliki gelanggang olahraga berstandar nasional.

### **C. Kesehatan**

1. Status kesehatan masyarakat Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dari tahun ke tahun yang ditandai dengan naiknya usia harapan hidup dari 68,0 pada tahun 2003 menjadi 68,5 pada tahun 2004. Selain itu, dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) terdapat penurunan di mana pada tahun 2003 AKI Kabupaten Purbalingga sebesar 82 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2004 turun menjadi 55 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang pada tahun 2009 baru menargetkan AKI sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Purbalingga yang pada tahun 2003 sebesar 7,7 per 1000 kelahiran hidup, turun menjadi sebesar 7 per1000 kelahiran hidup pada tahun 2004. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding target nasional pada tahun 2009 yaitu sebesar 25 per1000 kelahiran hidup.

Adapun Prevalensi Balita Gizi Kurang pada tahun 2003 sebesar 10,45 mengalami penurunan menjadi sebesar 10 persen pada tahun 2004; sedangkan target nasional pada tahun 2009 sebesar 20 persen.

2. Pengeluaran untuk kebutuhan pemeliharaan kesehatan pada saat ini menempati urutan ke-6 dari 8 (delapan) jenis pengeluaran non makanan (Susenas, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan ekonomi dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah.
3. Tingkat pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana, sarana, serta tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah sehingga dapat menjangkau dan melayani seluruh penduduk. Bersamaan dengan itu, diperlukan juga peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan tenaga kesehatan agar pelayanan yang diberikan juga semakin meningkat kualitasnya.

Kondisi prasarana, sarana, dan tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan jangkauan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah secara merata dan berkualitas. Pada tahun 2004 di Kabupaten Purbalingga terdapat 1 (satu) buah Rumah Sakit Umum Pemerintah tipe C, 2 (dua) buah Rumah Sakit Umum

Swasta masing-masing tipe D, dan 109 buah klinik/praktek dokter. Sedang tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 terdiri dari 23 orang Dokter Umum, 8 (delapan) Dokter Spesialis, 14 orang Dokter Gigi, 134 orang Perawat, 170 orang Bidan, dan 2 (dua) orang Ahli Gizi.

4. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih banyak dijumpainya kebiasaan merokok di masyarakat. Dari 15 jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat Purbalingga, tembakau menempati urutan kedua (15,86 persen). Demikian juga upaya menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi masih belum optimal. Pada tahun 2004 cakupan air bersih sebesar 64,27 persen dan cakupan jamban keluarga masih sekitar 50,5 persen. Sedangkan cakupan SPAL yang memenuhi syarat baru sebesar 64,27 persen.
5. Prevalensi kurang gizi terutama bagi anak dan balita dan ibu hamil di Kabupaten Purbalingga masih relatif tinggi, yaitu Prevalensi Balita Gizi Buruk sebesar 0,7 persen, Balita Kekurangan Energi Protein (KEP) sebesar 0,79 persen dan . Bumil Kekurangan Energi Kronis (KEK) sebesar 5,5persen.
6. Sampai dengan tahun 2004, cakupan Asupan Energi dan Vitamin kepada Balita dan Ibu Hamil cukup tinggi yaitu :

Distribusi Kapsul Vit. A pada Balita Febuari 99 persen dan Agustus 98,5 persen, Distribusi Kapsul Vit. A pada Bumil sebesar 90 persen, Distribusi tablet besi (Fe) Bumil sebesar 88 persen.

7. Cakupan Imunisasi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan angka yang relatif baik. Pada tahun 2004 cakupan Universal Children Immunization (UCI) secara umum cukup tinggi yang terdiri dari Cakupan imunisasi BCG sebesar 112,18 persen Cakupan imunisasi DPT1 sebesar 98,73 persen, DPT3 sebesar 95,37 persen, Polio 4 sebesar 94,51 persen, Campak sebesar 92,39 persen dan UCI desa sebesar 70 persen. Untuk cakupan imunisasi Ibu Hamil yaitu TT1 Bumil sebesar 56,15 persen, TT2 Bumil sebesar 52,23 persen. Adapun cakupan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yaitu DT sebesar 98,07 persen dan TT sebesar 94,07persen.

#### **D. Kependudukan dan Keluarga Berencana**

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan penurunan. Selama tahun 1990 sampai tahun 2000 sebesar 1,04 persen, sedangkan pada tahun 2003 sebesar 0,85 persen, dan pada tahun 2004 sebesar 0,77 persen. Hal ini menunjukan keberhasilan dari program kependudukan di Kabupaten Purbalingga.

2. Jika dilihat dari struktur, penduduk usia 0-14 tahun terlihat kecenderungan menurun (5,55 persen); sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) semakin meningkat (10,30 persen).
3. Dilihat dari sisi kemampuan keluarga, jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I alasan ekonomi di Kabupaten Purbalingga masih cukup tinggi yaitu 34,05 persen dari total keluarga yang ada yaitu sebanyak 238.488 KK (Pendataan Keluarga Tahun 2004).
4. Beberapa indikator menunjukkan kualitas pelayanan KB belum sepenuhnya memenuhi harapan, sehingga dikawatirkan akan mengganggu keefektifan Program KB. Hal ini terlihat dari Angka Kepesertaan Keluarga Berencana Aktif (PA) dengan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang hanya sebesar 26,78 persen, lebih kecil dibandingkan dengan peserta Non MKJP yang sebesar 73,22 persen. Adapun prevalensi pemakaian alat kontrasepsi pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin baru sebesar 76,83 persen.

## **E. Kesejahteraan Sosial**

1. Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 telah menurunkan aktivitas ekonomi sampai mencapai 24 persen. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan

ekonomi masyarakat sampai jangka waktu yang relatif panjang. Bagi kelompok ekonomi lemah, dampak krisis ekonomi masih dirasakan hingga saat ini. Menurunnya daya beli akibat peningkatan harga berbagai kebutuhan hidup yang sangat drastis tanpa diikuti peningkatan pendapatan secara nyata menyebabkan menurunnya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sebagian masyarakat. Dampak tidak langsung dari kondisi ini adalah meningkatnya angka pengangguran dan munculnya berbagai kerawanan sosial, serta meningkatnya angka kriminalitas seperti pencurian, kebingasan dan kekerasan massa, dan sebagainya.

Penurunan daya beli masyarakat secara drastis telah menyebabkan keluarga miskin semakin sulit untuk keluar dari kemiskinannya. Kondisi tersebut bahkan telah memunculkan keluarga miskin baru akibat meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja dan menurunnya kesempatan kerja.

2. Ketidakberdayaan masyarakat dan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat telah mengakibatkan lambatnya laju peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai dengan masih cukup besarnya jumlah keluarga miskin.

3. Meningkatnya kesejahteraan sosial di Kabupaten Purbalingga ditandai dengan menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan kesejahteraan sosial yang ditangani oleh masyarakat semakin tahun semakin meningkat yaitu dengan meningkatnya organisasi sosial maupun lembaga-lembaga sosial yang dikelola oleh masyarakat seperti panti asuhan dan sebagainya.
4. Pada tahun 2004, peran kaum perempuan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya masih lebih rendah dibanding kaum laki-laki. Konstruksi sosial yang menganggap kaum perempuan lemah, tidak mampu dalam semua hal, dan hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, telah menyebabkan mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dalam keluarga untuk mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan serta mengakses berbagai informasi dan sumber daya lainnya. Meskipun Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga telah menempati posisi ke-2 dan Indeks Pembangunan Gender menempati posisi ke- 35 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, tetapi upaya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender masih perlu untuk terus didorong.

## **F. Budaya dan Kehidupan Beragama**

1. Pada saat ini dirasakan telah terjadi peluruhan nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi penuntun norma-norma dan etika sosial dalam pergaulan masyarakat dan keluarga serta dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, termasuk birokrasi. Orientasi pembangunan pada masa lalu yang lebih difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan mensubordinasikan pembangunan bidang sosial budaya, telah mengakibatkan berbagai dampak negatif khususnya bagi pembangunan karakter, moral, dan budaya bangsa. Berkembangnya budaya materialisme, konsumtivisme, dan hedonisme, membudayanya korupsi, kolusi dan nepotisme, berkembangnya mentalitas menerabas dan kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, karya, dan inovasi, serta meningkatnya tindak kekerasan, premanisme, dan kriminalitas, merupakan akibat kebijakan pembangunan yang ”serba ekonomi” dan mengabaikan pembangunan budaya. Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan keramah-tamahan sosial yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Demikian pula kebanggaan atas jati diri bangsa semakin terkikis oleh nilai-nilai budaya asing yang dianggap lebih superior. Identitas nasional meluntur oleh

cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, sementara nilai yang lebih relevan bagi upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa (*nation and character building*) justru diabaikan. Pembangunan bidang kebudayaan antara lain pengembangan seni budaya sebagai media internalisasi nilai-nilai luhur yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan pembangunan karakter bangsa masih belum optimal.

2. Dalam kehidupan beragama, pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Kehidupan beragama baru pada tataran nilai dan simbol-simbol; belum dalam bentuk perilaku. Hal ini tercermin pada masih banyaknya perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, meningkatnya angka perceraian, ketidakharmonisan keluarga, pornografi dan pornoaksi menunjukkan semakin lemahnya sendi-sendi moral agama. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu menggambarkan adanya kesenjangan antara pemahaman atas teks ajaran agama dengan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan, karena belum optimalnya pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan mutu tenaga pendidik, kurang tertatanya kurikulum, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat yang dinamis.

#### **2.1.4. Ekonomi**

##### **A. Kondisi dan Struktur Ekonomi**

1. Fundamental ekonomi di daerah belum cukup kuat menahan gejala eksternal baik nasional maupun global. Hal ini terbukti pada kurun waktu krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga cukup tinggi dengan rata-rata di atas 6,5 persen per tahun, dan pada tahun 1997 mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 7,57 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan tersebut mengalami penurunan secara drastis dan terpuruk pada level minus 8,28 persen pada tahun 1998 yang merupakan puncak krisis dengan

tingkat inflasi mencapai 54,14 persen. Tingginya inflasi ini secara signifikan berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat yang selanjutnya secara berrantai menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

2. Sampai dengan tahun 2004 kondisi makro perekonomian Purbalingga semakin membaik. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mencapai 4,18 persen, sedangkan tahun 2000 sebesar 2,78 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2004 atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 1.921,654 milyar, meningkat cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya mencapai 1.605,464 milyar. Pada tahun 2001 inflasi di Kabupaten Purbalingga tercatat sebesar 18,13 persen, sedangkan pada tahun 2005 hanya sebesar 9,03 persen.
3. Tingkat pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Purbalingga relatif merata tetapi pada tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Hal ini terlihat dari Indek Gini tahun 2004 yang sebesar 0,2502 dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 2.468.000,-. Sementara itu angka kemiskinan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun yang sama menunjukkan angka sebesar 29.95 persen yang sebagian besar diantaranya bekerja di sektor non formal (75,54 persen).

4. Pergeseran struktur ekonomi nampak jelas dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 1980 lapangan usaha pertanian memberi kontribusi sebesar 54,5 persen terhadap total PDRB. Sedangkan sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 0,6 persen, sektor perdagangan sebesar 15 persen, dan sektor jasa-jasa sebesar 3,8 persen. Pada tahun 1990 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurun menjadi 38,3 persen, sementara kontribusi sektor industri dan jasa-jasa secara umum mengalami kenaikan. Tahun 2005 peranan sektor primer terutama sektor pertanian terus mengalami penurunan yaitu menjadi 35,6 persen. Sementara sektor lainnya yaitu sektor industri pengolahan sedikit meningkat menjadi 9,78 persen, sedangkan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan yang cukup berarti menjadi 18,25 persen dan sektor jasa sebesar 16,28persen.
5. Lambatnya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Purbalingga antara lain disebabkan oleh posisi geografis wilayah yang jauh dari jalur lalu lintas besar di Pulau Jawa baik jalur Utara maupun jalur Selatan. Padahal, salah satu pertimbangan investor dalam menanamkan investasinya di suatu wilayah adalah kemudahan transportasi, yang sangat berpengaruh terhadap biaya produksi.

## **B. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Sampai dengan tahun 2004, jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga mencapai 78.963 unit usaha, yang terdiri dari 78.538 unit usaha mikro dan kecil, serta 425 unit usaha menengah yang bergerak di berbagai bidang usaha, meliputi usaha perindustrian perdagangan, jasa, dan lain-lain.

### **2. Koperasi**

Pada tahun 2003, koperasi yang aktif di Kabupaten Purbalingga sebanyak 129 unit, sedangkan yang tidak aktif sebanyak 35 unit. Adapun jumlah koperasi primer sebanyak 164 unit dan KUD sebanyak 16 unit koperasi.

Pada tahun 2004 terjadi penambahan jumlah koperasi aktif sebesar 3,8persen menjadi 134 unit koperasi dan peningkatan volume usaha sebesar 53,54persen.

## **C. Industri**

1. Jumlah usaha mikro dan kecil sektor industri di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 tercatat sebanyak 21.563 unit usaha, sedangkan jumlah industri menengah sebanyak 15 unit usaha dan industri besar sebanyak 9 unit usaha.
2. Berkembangnya kegiatan sektor industri ternyata telah memberi kontribusi yang nyata dalam penyediaan kesempatan

kerja. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap di sektor industri sebanyak 68.942 orang atau sebesar 17,04 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja.

#### **D. Penanaman Modal**

Total nilai investasi di sektor industri pada tahun 2003 sebesar Rp. 45.060.198.000,- dan meningkat pada tahun 2004 menjadi sebesar Rp. 48.260.784.000,- atau naik 7,10 persen. Demikian juga nilai produksi mengalami kenaikan dari Rp. 356.118.000.000,- pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 374.182.000.000,- pada tahun 2004 atau mengalami kenaikan sebesar 5,07 persen. Adapun nilai ekspor mengalami kenaikan sebesar US\$ 13.205.752,-, pada tahun 2003 menjadi US\$ 15.128.482,-.sebesar 14,52 persen.

#### **E. Perdagangan**

1. Setelah sektor Pertanian dan Industri, Sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar ketiga adalah sektor perdagangan yaitu sebesar 19,50 persen atau sebanyak 75.453 orang.
2. Untuk sarana perdagangan di Kabupaten Purbalingga, banyaknya pasar pada tahun 2004 sebanyak 41 buah yang terdiri dari 3 buah pasar swalayan,34 buah pasar umum, pasar hewan 2 buah, pasar sepeda 1 buah dan pasar ikan 1 buah.

Bila dibandingkan tahun 2003, pasar umum di Kabupaten Purbalingga meningkat sebesar 4,88 persen atau mengalami penambahan sebanyak 2 buah.

3. Sektor basis lainnya adalah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,09 dan jasa-jasa dengan nilai LQ sebesar rata-rata 2,15. Sektor jasa, termasuk di dalamnya jasa pemerintahan, sosial kemasyarakatan, jasa hiburan serta jasa perorangan dan rumah tangga. Berkembangnya jasa pendidikan, jasa kesehatan yang mencakup rumah sakit, rumah sakit bersalin, dokter praktek, jasa hiburan berupa obyek wisata yang menjadi salah satu sumber PAD serta jasa perorangan dan rumah tangga yang mencakup jasa perbengkelan, reparasi dan pembantu rumah tangga juga mendorong sektor ini menjadi sektor basis.

## **F. Pariwisata**

1. Kondisi alam Kabupaten Purbalingga sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, tetapi sampai saat ini belum didayagunakan secara optimal. Hal ini terlihat belum menjadikan Purbalingga menjadi daerah tujuan wisata di wilayah regional walaupun memiliki berbagai ragam potensi wisata dengan sumberdaya alam yang mempesona. Hal ini disebabkan oleh kondisi objek wisata, baik alam maupun buatan tersebut belum dikelola dengan optimal, sehingga objek

wisata yang ada kurang kompetitif dalam persaingan pasar regional maupun nasional. Hanya beberapa objek wisata yang sudah dikelola dengan baik. Jumlah objek wisata yang ada di Purbalingga pada tahun 2004 sebanyak 10 buah, terdiri atas 4 objek wisata alam dan 6 objek wisata buatan. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2004 sebanyak 143.198 orang. Jumlah tamu menginap di seluruh hotel wilayah Purbalingga tahun 2004 adalah 18.154 orang.

2. Sumbangan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar Rp. 153.028.000,- meningkat menjadi sebesar Rp. 171.377.870,- pada tahun 2004.

## **G. Ketenagakerjaan**

1. Data Susenas 2003 menunjukkan penduduk usia kerja 10 tahun keatas sebanyak 682.865 jiwa atau sekitar 80,62 persen yang terdiri dari Angkatan Kerja 404.477 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 278.388 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2002 sebesar 58,01 persen dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi sebesar 59,23 persen. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih besar dibanding TPAK perempuan yakni sebesar 73,64 persen. Adapun TPAK perempuan adalah sebesar

44,96 persen. TPAK perempuan pada tahun 2003 sedikit mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2002 yaitu sebesar 42,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan semakin meningkat.

2. Berdasarkan lapangan kerja, sektor pertanian masih merupakan lapangan kerja utama bagi penduduk Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2003 proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 37,69 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, angkutan dan jasa lainnya yaitu sebanyak 34,87 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor industri, konstruksi, pertambangan, listrik dan air sebanyak 27,44 persen dari penduduk yang bekerja. Hal ini mencerminkan adanya dinamika perekonomian Kabupaten Purbalingga dimana peran sektor sekunder dan tersier terus mengalami peningkatan.
3. Sejalan dengan terus bertumbuhnya perekonomian Kabupaten Purbalingga serta berkembangnya sektor-sektor sekunder dan tersier, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga juga terus mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga tahun 2002 sebesar 4,95 persen, mengalami penurunan menjadi sebesar 3,66 persen pada tahun 2003, dan kembali mengalami

penurunan menjadi ..... pada tahun 2004. Tingkat pengangguran terdidik sebesar 12,53 persen yang menurun dari tahun sebelumnya yakni 17,88 persen.

4. Pada tahun 2003 penduduk pencari kerja di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh penduduk usia muda (kurang dari 25 tahun) yaitu sebanyak 67,42 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 37 persen pencari kerja di Kabupaten Purbalingga tamat SD. Sedangkan 15,75 persen di antaranya tamat SLTP dan 8,85 persen tamat SLTA. Adapun pencari kerja tamatan perguruan tinggi hanya sebesar 2,27 persen.
5. Bertumbuhnya ekonomi Kabupaten Purbalingga khususnya pada sektor-sektor sekunder dan tersier telah semakin memperluas kesempatan kerja, terbukti dengan meningkatnya tingkat kesempatan kerja. Pada Tahun 2003 tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Purbalingga sebesar 96,34 persen yang meningkat dari tahun 2002 yakni 95,05 persen.

## **H. Pertanian**

1. Pemulihan kinerja perekonomian daerah pasca krisis membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai PDRB harga konstan tahun 2003 yang baru mencapai level yang sama dengan tahun 1997. Relatif lamanya pemulihan ekonomi di Kabupaten Purbalingga bisa jadi disebabkan oleh dominasi sektor primer (pertanian)

dalam struktur perekonomian daerah, padahal tingkat produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian masih relatif rendah. Di sisi lain sebagian besar produk pertanian belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai input antara bagi sektor-sektor terkait lainnya (*backward and forward linkages*) sehingga efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya relatif kecil.

2. Relatif rendahnya produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian antara lain disebabkan usaha pertanian pada umumnya masih dikelola secara tradisional dengan sedikit sentuhan teknologi. Akibatnya jenis, kualitas, dan kapasitas produk pertanian pada umumnya belum mampu bersaing dengan produk sejenis dari luar. Sementara lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan jasa yang merupakan sektor sekunder dan tertier belum mampu secara signifikan menggeser dominasi sektor primer dalam rangka mendongkrak dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ), sektor pertanian tanaman pangan merupakan sektor basis. Selama tahun 2001-2005 nilai LQ sektor pertanian tanaman pangan rata-rata sebesar 1,57. Artinya, sektor pertanian tanaman pangan dapat memenuhi kebutuhan daerah dan mampu mengekspor

produksinya ke luar daerah. Hal tersebut diperkuat dengan kemampuan Kabupaten Purbalingga untuk berswasembada pangan khususnya beras sehingga terjadi surplus sekitar 35 ribu ton dalam tahun 2004.

4. Sementara itu, berdasarkan analisis DLQ (*Dynamic Location Quotient*) selama 5 (lima) tahun, sektor pertanian menunjukkan nilai kurang dari satu (0,872) yang berarti terdapat kecenderungan semakin berkurangnya peran sektor pertanian dari tahun ke tahun. Hal ini berarti bahwa, ke depan sektor pertanian yang semula merupakan sektor basis bisa jadi akan menjadi sektor non basis. Sebaliknya sektor industri memiliki DLQ sebesar 15,34 yang berarti bahwa sektor ini memiliki kecenderungan terus berkembang. Kecenderungan ini cukup positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Purbalingga.
5. Sub sektor peternakan juga merupakan sektor basis yang mampu mencukupi kebutuhan daerah dan mampu mengekspor produknya ke daerah lain. Hal ini didukung dengan peningkatan populasi dan produksi beberapa jenis ternak.
6. Pada tahun 2004 luas lahan persawahan beririgasi seluas 18.161 hektar dan sawah tadah hujan seluas 4.051 hektar. Dengan luas areal tanam padi seluas 32.182 hektar dapat menghasilkan gabah sebanyak 211.338 ton atau setara beras

sebanyak 113.191 ton dengan produktivitas sebesar 6,57 ton/hektar.

7. Adapun produksi jagung pada tahun 2004 sebanyak 31,304 ton dari luas areal tanam seluas 7,038 hektar dengan nilai produktivitas sebesar 4,45 ton/hektar. Dengan jumlah konsumsi jagung yang hanya sebesar 1.345 ton/tahun, maka surplus produksi jagung cukup besar. Namun untuk kebutuhan kedelai masih belum tercukupi. Jumlah konsumsi kedelai yang sebesar 9.242 ton/tahun baru bisa dipenuhi sebesar 744 ton.
8. Produktivitas budidaya singkong di Kabupaten Purbalingga sebesar 26,51 ton/hektar, sehingga dengan areal tanam seluas 9.622 hektar menghasilkan 255.044 ton. Dibandingkan dengan nilai konsumsi singkong yang hanya sebesar 54.663 ton/tahun, maka terdapat surplus sebesar 201.381 ton/tahun.
9. Luas areal tanam dan produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Purbalingga tahun 2004 berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 2.1  
 Produktivitas tanaman Perkebunan  
 Kabupaten Purbalingga  
 Tahun 2004

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL (hektar)	PRODUKTIVITAS (ton/hektar)
1	teh	166	0.61
2	kopi	1.231	0.45
3	kelapa deres	5.301	9.98
4	tembakau	27	2.15
5	lada	246	1,25
6	tebu	56	3.84
7	kelapa	12.113	1.02
8	cengkeh	544	0,05
9	kapuk	5	0,20
10	melati gambir	433	7,55
11	nilam	718	0.01
12	pandan	58	5.34
13	pinang/jambe	85	1.67
14	glagah arjuna	646	1,40
15	sereh	70	9,57
16	dan melinjo	90	4,66

10. Produksi peternakan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Produktivitas sub sektor peternakan  
Kabupaten Purbalingga Tahun 2004

NO	KOMODITAS	PRODUKSI	POPULASI
1	Sapi	4.468 ekor/tahun	16.682 ekor
2	Susu	30.637 liter/tahun	94 ekor
3	Ayam Petelor	2.934 kg/tahun	2.934.500 ekor
4	Ayam Pedaging	148.798 kg/tahun	2.231.276 ekor
5	Itik Petelor	5.996.784 kg/tahun	102.697 ekor

11. Subsektor perikanan belum mampu menjadi sektor basis selama 5 tahun terakhir. Meskipun terlihat adanya kecenderungan peningkatan kontribusi subsektor perikanan, namun perkembangan produksinya masih relatif rendah. Produksi ikan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 sebesar 2.472,9 ton/tahun dari luasan kolam 157 hektar.

## **I. Ketahanan Pangan**

1. Masih tingginya ketergantungan kebutuhan pangan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga menjadi permasalahan tersendiri dalam pembangunan ekonomi. Tingginya ketergantungan konsumsi pada beras mengakibatkan tekanan terhadap peningkatan produksi padi semakin tinggi.
2. Produksi beras Purbalingga sudah dapat memenuhi sekitar 130 persen kebutuhan beras, namun ke depan perlu dikembangkan dan dikampanyekan penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan sumber bahan pangan pokok karbohidrat lain yang tersedia dan potensial untuk dikembangkan yaitu palawija dan umbi-umbian. Di sisi lain sumber protein yang berasal dari daging, telur dan susu, tingkat konsumsinya masih relatif rendah. Pola pangan harapan (PPH) dengan tingkat konsumsi energi sebesar 2.200 kkal baru mencapai skor 66,7 dari skor ideal sebesar 100. Konsumsi sumber energi dari beras yang sebetulnya hanya dibutuhkan sebesar 1.100 k.kal, tingkat konsumsinya mencapai 2.104 kkal, sedang tingkat konsumsi pangan hewani yang dibutuhkan sebesar 264 kkal, tingkat konsumsinya hanya mencapai 76 kkal. Pola konsumsi seperti ini tentu saja kurang mendukung pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

### 2.1.5. Sarana dan Prasarana

1. Kebutuhan penyediaan infrastruktur penunjang bagi kegiatan ekonomi dan sosial yang terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan laju pertumbuhan penduduk serta dinamika sosial dan ekonomi. Kondisi ini ternyata tidak diikuti dengan kemampuan belanja pemerintah sehingga kebutuhan infrastruktur tersebut belum dapat sepenuhnya dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
2. Pada tahun 2003, dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 709,86 Km, sekitar 119,25 Km atau 16,8 persen masih dalam kondisi jalan tanah, sekitar 213,04 Km atau 30,15 persen merupakan jalan aspal, dan sisanya merupakan jalan kerikil dan batu.
3. Tingginya kerusakan jalan akibat *over loading* dan sistem penanganan yang kurang optimal akibat terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah berakibat pada hancurnya jalan sebelum umur teknis tercapai, sehingga diperlukan biaya tambahan untuk memperbaikinya. Hal tersebut akan berimplikasi pada berkurangnya alokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan atau peningkatan jalan yang lain.
4. Sementara itu, belum lengkapnya rambu, marka, penunjuk arah menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan manajemen dan fasilitas lalu lintas.

5. Kebutuhan infrastruktur yang sangat mendesak dipenuhi dan membutuhkan investasi pembangunan yang sangat besar adalah infrastruktur irigasi dan pengairan. Di samping itu, terkait dengan pengelolaan potensi sumber daya air, juga sangat dibutuhkan berbagai bangunan dalam rangka konservasi sumberdaya air khususnya normalisasi aliran sungai yang telah banyak berubah akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.
6. Kabupaten Purbalingga yang sebagian besar wilayahnya berada di lereng gunung memiliki ketersediaan air yang cukup berlimpah. Namun demikian, secara alamiah Kabupaten Purbalingga menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan air. Distribusi yang tidak merata baik secara spasial maupun waktu, menyebabkan air yang dapat disediakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, baik dalam perspektif jumlah maupun mutu. Dari segi spasial, beberapa wilayah mengalami kesulitan dalam penyediaan air untuk kegiatan budidaya pertanian. Sementara dari segi distribusi waktu sepanjang tahun, 80 persen air tersedia pada musim penghujan yang berdurasi sekitar lima bulan, sedangkan 20 persen lainnya tersedia pada musim kemarau dengan durasi tujuh bulan. Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, selain menimbulkan manfaat, juga menimbulkan potensi

bahaya banjir. Sebaliknya pada musim kemarau, kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bencana berupa kekeringan yang berkepanjangan.

7. Luas areal sawah beririgasi yang ada di Kabupaten Purbalingga seluas, 22.213 hektar yang terdiri dari 7.876 hektar beririgasi teknis dan 3.701 hektar beririgasi setengah teknis, serta 6.586 hektar beririgasi sederhana. Selain itu, terdapat sawah tadah hujan yang pada umumnya berada di wilayah tinggi yang tidak memungkinkan pemberian air irigasi dari sungai dan sumber air lain di wilayah tersebut. Sawah tadah hujan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir tahun 2004 terhitung seluas 4.050 hektar. Untuk mensuplai air pada areal pertanian telah terbangun jaringan dan bangunan irigasi yang berupa bangunan utama sebanyak 101 unit, bangunan pengatur sebanyak 554 unit, bangunan pembawa sebanyak 1.242 unit, dan saluran sepanjang 233 Km.
8. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, jumlah kebutuhan air baku di luar keperluan budidaya pertanian semakin meningkat. Kebutuhan air yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan air yang memadai dan merata sehingga terjadi kelangkaan air di beberapa wilayah. Di wilayah Kecamatan Kejobong dan Pengadegan, serta beberapa wilayah di

Kecamatan Kemangkon, kekurangan air terjadi di setiap tahun, khususnya pada musim kemarau. Pada sisi lain, masih banyak sumber air yang belum dimanfaatkan secara optimal.

9. Masyarakat yang tinggal di pedesaan yang belum banyak mendapatkan akses pelayanan air bersih dari PDAM telah mengupayakan pemenuhan air bersih dengan berbagai cara, seperti membuat sumur gali, sumur bor, serta pemanfaatan mata air yang digunakan baik secara individual maupun secara bersama (komunal). Di samping itu, sebagian masyarakat juga memanfaatkan sumber-sumber air lainnya seperti air sungai atau saluran irigasi, yang tentu saja tidak memenuhi syarat baku mutu air. Pengembangan fasilitas air bersih bagi wilayah rawan kekeringan masih jauh dari memadai. Beberapa fasilitas air bersih yang telah dibangun tidak digunakan secara optimal karena berbagai alasan.
10. Rata-rata cakupan pelayanan air bersih oleh PDAM Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2004 sebesar 11,96 persen, jauh di bawah standar Departemen Pekerjaan Umum, sebesar 55 – 75 persen.
11. Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan energi khususnya energi listrik adalah masih rendahnya tingkat elektrifikasi. Meskipun secara keseluruhan desa-desa di Kabupaten Purbalingga sudah

mendapatkan pelayanan listrik PLN, ternyata sampai tahun 2002 tingkat elektrifikasi di Kabupaten Purbalingga masih rendah yaitu lebih dari 53 persen, yang berarti bahwa hampir separuh jumlah rumah tangga belum mendapatkan pelayanan kelistrikan. Hal ini disebabkan karena jaringan transmisi PLN yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah terutama wilayah-wilayah pedukuhan yang terpencil dengan jumlah penduduk (calon pelanggan) yang relatif kecil sehingga secara ekonomis akan kurang menguntungkan bagi PLN untuk membangun jaringan transmisi ke wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu kapasitas pasokan energi PLN juga sangat terbatas.

12. Kebutuhan telekomunikasi sebagai wahana terselenggaranya arus berita, informasi, dan data baik pada tataran lokal, nasional, maupun internasional secara lancar, jelas, dan cepat juga sangat diperlukan dalam rangka mendukung berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi. Tidak memadainya prasarana telekomunikasi sebagai prasarana dasar untuk mengakses informasi akan menghambat laju perkembangan daerah dalam berbagai bidang kehidupan.
13. Pada saat ini, jangkauan layanan telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga masih sangat timpang, terbukti masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau jaringan layanan

telekomunikasi. Jumlah STT (sambungan telepon tetap) masih belum optimal. Beberapa wilayah kecamatan masih belum terjangkau STT, sementara STB (sambungan telepon bergerak) juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah, meskipun area layanan terus mengalami peningkatan. Demikian juga pengguna dan penyedia jasa internet dirasa masih jauh dari harapan.

14. Kondisi prasarana perkotaan sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umum serta pusat berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta demi meningkatkan daya tarik kota bagi investasi dan kegiatan lainnya. Prasarana dasar perkotaan sebagai pendukung kelancaran dan kenyamanan kehidupan dan berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi seperti drainase, jalan, fasilitas persampahan dan sebagainya masih perlu untuk ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya. Demikian juga berbagai fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi seperti prasarana perdagangan, prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan, prasarana pelayanan jasa transportasi, berbagai fasilitas rekreasi, olahraga, dan seni budaya, termasuk ruang terbuka hijau masih perlu ditingkatkan.

15. Di kawasan terbangun, luas daerah resapan jauh lebih sedikit daripada di kawasan lindung. Hal yang masih harus dipertimbangkan adalah kecukupan luas daerah resapan, khususnya di daerah perkotaan yang memiliki luas lahan terbangun relatif besar.
16. Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan perumahan secara layak sehingga kualitas lingkungan permukiman relatif rendah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam penyediaan rumah yang layak huni dan penataan serta penyediaan berbagai fasilitas permukiman sangat diperlukan. Pada tahun 2005 jumlah rumah keluarga miskin yang kurang layak huni di Kabupaten Purbalingga sebanyak 5.019 buah rumah.

Melalui Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (PSPR-Gakin), dengan dukungan swadaya masyarakat, pada tahun 2003 telah berhasil dipugar sebanyak 3.054 rumah kurang layak huni, dan pada tahun 2004 sebanyak 1.397 rumah.

17. Salah satu permasalahan di sektor permukiman adalah masalah persampahan. Pelayanan penanganan timbulan sampah masih terkonsentrasi di perkotaan dan tempat-tempat umum. Jumlah timbulan sampah yang mencapai 288 m<sup>3</sup>/hari baru dapat

tertangani 145 m<sup>3</sup>/hari. Sementara itu, jumlah prasarana persampahan khususnya TPS, dan Transfer Depo masih sangat sedikit terlebih lagi di perkampungan. Penanganan persampahan di TPA juga masih menggunakan sistem *open dumping*, masih jauh dari yang diharapkan yaitu *sanitary landfill*.

#### **2.1.6. Wilayah dan Tata Ruang**

1. Perbedaan kapasitas dan potensi antar wilayah telah menyebabkan perbedaan laju perkembangan dan kemajuan antar wilayah. Di sisi lain perbedaan karakteristik antar wilayah yang meliputi kondisi geografis, agroekologi, sosial, ekonomi, demografis, kondisi infrastruktur, dan kondisi alamiah lainnya telah menyebabkan perbedaan permasalahan dan kebutuhan pembangunan antar wilayah.
2. Ketersediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan sosial dan infrastruktur diharapkan akan mendorong berbagai aktivitas sosial dan ekonomi sehingga akan meningkatkan akselerasi pembangunan wilayah. Masih adanya kesulitan akses ke beberapa wilayah akibat rendahnya kualitas infrastruktur jalan harus mendapat perhatian sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

3. Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah menyebabkan desakan yang semakin kuat terhadap potensi sumberdaya lahan dan ruang. Peningkatan penggunaan lahan dan ruang untuk berbagai fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi serta pembangunan berbagai infrastruktur menyebabkan semakin berkurangnya lahan dan ruang dari waktu ke waktu. Sementara lahan menjadi sumberdaya yang vital bagi kegiatan produksi pertanian yang merupakan sumber bahan kebutuhan hidup pokok manusia. Hal tersebut mengharuskan adanya efisiensi pemanfaatan lahan dan ruang terutama bagi pembangunan fisik.
4. Beberapa wilayah di bagian utara Kabupaten Purbalingga yang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk relatif rendah dan permukiman penduduk yang menyebar, menghadapi kendala aksesibilitas. Terbatasnya akses (transportasi dan telekomunikasi) yang menghubungkan dengan wilayah lain yang relatif lebih maju, terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi (pasar, bank, listrik, dan jaringan distribusi), dan terbatasnya sarana prasarana sosial dasar (terutama pendidikan dan pelayanan kesehatan) yang berkualitas, disertai kondisi dan potensi wilayah yang relatif rendah telah menjadikan daerah tersebut menjadi wilayah tertinggal.

5. Terkonsentrasinya penduduk di wilayah tertentu khususnya di wilayah perkotaan telah menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap SDA di sekitar kota untuk mendukung kehidupan masyarakat, terjadinya secara terus menerus konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri, serta menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya perusakan lingkungan dan timbulnya polusi.
6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih relatif tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang belum sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan, justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan.

7. Pelaksanaan pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang yang dilakukan belum sepenuhnya mengacu pada

dokumen perencanaan wilayah dan tata ruang yang telah dibuat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Permasalahan yang muncul kemudian adalah sering terjadinya konflik dalam pemanfaatan ruang dan lahan, baik konflik antar pengguna lahan (horisontal dalam masyarakat), konflik dalam tataran kebijakan pengembangan dunia usaha dan investasi (vertikal antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha), serta konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

### **2.1.7. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**

1. Meskipun pada saat ini kondisi lingkungan hidup masih mampu mendukung kehidupan manusia tetapi disadari bahwa kualitas lingkungan hidup terus mengalami penurunan yang antara lain ditandai dengan gejala menurunnya kekayaan plasma nutfah terutama berupa biota yang hidup di perairan umum, berbagai jenis binatang dan tanaman langka, terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Degradasi kualitas lingkungan hidup berupa pencemaran air, udara, dan tanah serta penurunan kekayaan plasma nutfah di samping merupakan penurunan aset juga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yang akan berdampak

negatif bagi kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung.

2. Pencemaran lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kurangnya upaya konservasi dan rehabilitasi terhadap sumber daya alam yang rusak telah mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan.
3. Karena kondisi geografisnya, di Kabupaten Purbalingga terdapat kawasan-kawasan yang rentan terhadap ancaman terjadinya bencana longsor, banjir, kekeringan, dan/atau bencana alam lainnya, yang disamping mengancam keselamatan jiwa penduduk juga potensial mengakibatkan kerugian yang cukup besar.
4. Wilayah Kabupaten Purbalingga termasuk bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu yang terbagi dalam 3 Sub DAS yakni Sub DAS Klawing, Sub DAS Pekacangan, dan Sub DAS Gintung. Kondisi tutupan lahan yang ada dikategorikan ke dalam kondisi buruk dan sangat buruk (23,67%), sedang (65,62%), dan baik serta sangat baik (10,72%).
5. Kondisi lahan di areal budidaya pertanian didominasi oleh lahan dengan kategori potensial kritis seluas 24.531,31 hektar (44,56%), lahan tidak kritis seluas 17.931,30 hektar (32,57%), lahan agak kritis seluas 9.546,28 hektar (17,34%), lahan kritis

seluas 1.982,43 hektar (3,60%), dan lahan sangat kritis seluas 1.059,91 hektar (1,93%).

6. Pada saat ini, kondisi lahan kritis di kawasan lindung di luar kawasan hutan sudah mulai rusak. Hal tersebut dapat dilihat dari luasnya lahan agak kritis yang mencapai 5.337,02 hektar (55,42%), lahan potensial kritis seluas 2.367,57 hektar (24,59%), lahan kritis seluas 1.375,31 hektar (14,26%), lahan tidak kritis seluas 539,52 hektar (5,60%), dan lahan sangat kritis seluas 10,25 hektar (0,11%).
7. Kondisi lahan kritis di areal kawasan hutan produksi dalam wilayah Purbalingga didominasi oleh lahan potensial kritis dengan luas 11.421,97 hektar (95,97%), disusul oleh lahan agak kritis dengan luas 480,21 hektar (4,03%).
8. Kawasan hutan lindung di wilayah kabupaten Purbalingga kondisinya didominasi oleh lahan yang dikategorikan potensial kritis dengan luas 1.181,02 hektar (100%)
9. Kabupaten Purbalingga memiliki potensi sumber daya alam yang beranekaragam, baik dari kelompok terbarukan (*renewable*) seperti hutan, ternak, ikan, tumbuhan penghasil getah, buah, biji dan sebagainya dan kelompok tidak terbarukan (*non-renewable*) khususnya bahan tambang, dan sumberdaya alam golongan *continuous flow* seperti air, udara, dan tanah.

10. Sumberdaya alam yang telah dimanfaatkan secara intensif antara lain sumberdaya hutan, sumberdaya mineral, sumberdaya air, dan sumberdaya lahan untuk budidaya. Sumberdaya hutan di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam Kesatuan pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Gunung Slamet Timur. Luas hutan tercatat 20.429,16 hektar atau 26,26 persen dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga. Luas hutan yang ada masih dibawah luas hutan minimum sebagaimana diatur pada UU No 41/1999 tentang Kehutanan yaitu sebesar 30 persen. Sumberdaya mineral yang ada berupa bahan galian C atau non strategis/non vital. Bahan galian C ini terdiri dari bahan galian *andesit builder*, tanah urug, sirtu, batu pasir, trass, batu gamping, kalsit, lempung *alluvial*, lempung sedimen, batu setengah permata, dan lignit. Bahan galian Andesit Builder yang digunakan untuk bahan bangunan terdapat di 23 lokasi tanah hak milik dengan luas sebaran sekitar 350 Ha serta cadangan tidak kurang dari 108,75 m<sup>3</sup>, dan pada 29 lokasi kawasan hutan dengan luas sebaran 3.470 Ha serta cadangan tidak kurang dari 100 juta m<sup>3</sup>. Selain itu terdapat andesit batu tempel (*sheetingjoint andesita*) dengan luas sebaran 215 hektar serta cadangan mencapai 6,5 juta m<sup>3</sup>.

11. Bahan galian tanah urug terdapat di 19 lokasi dengan sebaran 410 hektar dan cadangan 13,5 juta m<sup>3</sup>. Sirtu terdapat di 55 lokasi dengan luas sebaran sekitar 21.600 Ha dan cadangan 13,5 juta m<sup>3</sup>. Batu pair terdapat di 24 lokasi dengan luas sekitar 4.400 hektar dan cadangan tidak kurang dari 145 juta m<sup>3</sup>. Trass terdapat di 4 lokasi dengan luas sebaran mencapai 450 Ha dan cadangan 12 juta m<sup>3</sup>. Batu gamping terdapat di 4 lokasi dengan luas sebaran 40 Ha dan cadangan 530.000 m<sup>3</sup>. Kalsit yang dapat dipakai sebagai bahan aditif dalam obat-obatan dan kimia serta bahan baku pembuatan keramik, kosmetik, isolator terdapat di 3 lokasi dengan cadangan seluas 15 ribu m<sup>3</sup>. Lempung (alluvial) terdapat di 65 lokasi dengan luas sebaran 7.250 Ha dan cadangan 365 juta m<sup>3</sup>. Lempung (sedimen) terdapat di 22 lokasi dengan luas sebaran 3.250 Ha dan cadangan 165 juta m<sup>3</sup>. Batu setengah permata terdapat di 8 lokasi dengan luas sebaran 70 Ha dan cadangan 110.000 m<sup>3</sup>. Bahan galian Lignit terdapat di kecamatan rembang dengan cadangan relatif kecil sebanyak 3.000 m<sup>3</sup>.
12. Sumberdaya air yang berasal dari mata air tercatat ada 163 buah dengan kapasitas 5.044,45 liter per detik, sehingga jumlah potensi sumberdaya air dalam 1 (satu) tahun sebesar 159.083,352 liter. Potensi sumberdaya air tanah tercatat sebanyak 471.412.367 m<sup>3</sup>.

13. Perkembangan jumlah penduduk serta meningkatnya intensitas aktivitas seperti pertanian, industri, rumah sakit, transportasi serta aktivitas rumah tangga, dan lain-lain yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup telah mengakibatkan pencemaran tanah, air, maupun udara sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan yang pada akhirnya akan semakin mengancam terhadap kesehatan masyarakat.
14. Penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman seperti air bersih, sanitasi, dan persampahan pada umumnya masih belum memadai. Demikian juga penyediaan ruang terbuka hijau terutama di wilayah perkotaan persentasenya masih belum memenuhi standar minimal.

## 2.2. TANTANGAN

### 2.2.1. Pemerintah dan Aparatur

1. Meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan yang terus berlangsung berimplikasi pada peningkatan beban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam kondisi keterbatasan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah seperti Kabupaten Purbalingga maka tantangan yang dihadapi pada masa mendatang akan menjadi semakin terasa berat.
2. Meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi menyebabkan meningkatnya tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan dalam masyarakat dan lingkungan nasional maupun internasional yang begitu cepat, maka, penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk semakin semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta tuntutan perubahan dalam masyarakat. Meningkatnya permasalahan dan kebutuhan pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, di tengah terbatasnya kemampuan belanja pemerintah akibat keterbatasan potensi sumberdaya yang

dimiliki, maka pemerintah juga dituntut untuk memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan penyelenggaraan pembangunan, responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, mampu bersikap dan bertindak profesional, serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat. Pemerintah juga dituntut untuk semakin dapat mewujudkan keadilan dan penegakkan hak asasi manusia.

Penyelenggaraan pemerintahan yang telah berjalan dalam kurun waktu yang panjang dengan memegang hegemoni dalam segala aspek kehidupan telah menciptakan kultur birokrasi yang mapan dan permanen. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan atau reformasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi aspek kelembagaan, aspek sumberdaya manusia, dan aspek penyelenggaraan administrasi yang terdiri dari kinerja perencanaan, pengawasan dan pengendalian, kearsipan, serta kinerja pelayanan publik.

3. Dengan adanya kecenderungan meningkatnya kepentingan dunia usaha dan pemilik modal terkait dengan pengambilan kebijakan politik pemerintah, akan menjadi tantangan tersendiri dalam perumusan kebijakan pemerintah agar kepentingan publik senantiasa terlindungi. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai

regulasi sebagai upaya mengantisipasi dampak negatif dari perluasan aktivitas dan kepentingan bisnis terhadap kepentingan publik yang lebih luas.

4. Meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya standar kehidupan masyarakat juga menyebabkan terus meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah. Peningkatan beban belanja pemerintah daerah ini apabila tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah akan semakin menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah bagaimana meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal daerah. Meskipun demikian, upaya peningkatan PAD tidak boleh berakibat kontraproduktif bagi perekonomian rakyat. Upaya peningkatan PAD sejauh mungkin diupayakan melalui berbagai sumber yang tidak membebani masyarakat.
5. Keterbatasan potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki daerah terutama sumberdaya finansial di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping menghendaki adanya optimalisasi pendayagunaan potensi sumberdaya pembangunan juga diperlukan peningkatan peran sektor swasta dalam rangka

meningkatkan akselerasi pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kemampuan daerah dalam menarik dan memanfaatkan investasi swasta.

6. Era globalisasi yang ditandai dengan semakin intensnya aktivitas lintas batas serta mobilitas sumberdaya yang sangat cepat antar wilayah maupun antar negara membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan rente ekonomi. Bersamaan dengan itu, adanya dinamika lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (*digital divide*) semakin memunculkan ketidakpastian. Dalam kondisi yang demikian maka eksistensi suatu daerah atau suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan daya saing daerah atau negara tersebut. Untuk dapat menjawab tuntutan perubahan dan dinamika lingkungan seperti ini maka dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang handal serta profesional untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan agar pemerintah mampu menyelenggarakan fungsinya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga dibutuhkan

kelembagaan pemerintah yang mampu menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien.

7. Adanya perubahan peraturan perundangan dari waktu ke waktu serta dinamika lingkungan internal maupun eksternal dan berkembangnya kebutuhan masyarakat memerlukan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah dan pemerintahan desa secara terus menerus.
8. Revolusi teknologi informasi (TI) yang berlangsung sangat cepat pada saat ini di samping merupakan peluang bagi pengembangan manajemen penyelenggaraan pemerintahan juga saligus merupakan tantangan bagi praktik administrasi pemerintahan. Di masa yang akan datang, seiring dengan tingkat kemajuan masyarakat, penggunaan TI merupakan keniscayaan karena akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, serta mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu, perlu dilakukan upaya terus menerus dalam rangka pemanfaatan dan sosialisasi TI dalam bentuk *e-government*, *e - procurement*, *e-business* dan *cyber law*. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain, maka diperlukan peningkatan fungsi kehumasan dengan memanfaatkan berbagai media baik media komunikasi verbal, cetak, audio, audio visual, serta *cyber net*.

### **2.2.2. Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban**

1. Kondisi masyarakat bangsa yang majemuk di mana terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, dengan berbagai adat dan budaya yang menjadi ciri khasnya di samping merupakan kekuatan juga mengandung potensi ancaman bagi integrasi bangsa dan negara. Sementara itu, proses globalisasi yang mengaburkan batas-batas wilayah akan menyebabkan semakin gencarnya penetrasi budaya asing. Hal ini merupakan salah satu ancaman bagi integritas kebangsaan. Oleh karena itu upaya penanaman dan pengembangan paham kebangsaan serta semangat nasionalisme harus terus dilakukan.
2. Kecenderungan muncul dan berkembangnya paham-paham ekstrim dan radikal terutama radikalisme agama merupakan tantangan yang harus terus diwaspadai.
3. Kehidupan demokrasi Indonesia yang masih dalam proses mencari bentuk serta belum terwujudnya kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik, maka sampai dengan beberapa tahun mendatang masih dimungkinkan munculnya ancaman konflik sosial dan politik pada tataran horisontal maupun vertikal. Kehidupan politik sebagai aspek yang potensial menimbulkan konflik harus mendapatkan perhatian agar dapat

diwujudkan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis.

4. Belum berkembangnya budaya hukum dan meningkatnya indikasi kerawanan sosial dan keamanan, serta belum berkembangnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk yang terus meningkat merupakan faktor korelatif kriminogen dan *police hazard* yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan konvensional. Faktor korelatif kriminogen dan *police hazard* ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis dan terus-menerus dalam rangka mengembangkan budaya hukum dalam segala aspek kehidupan.
5. Kecenderungan peningkatan intensitas tindak kekerasan dan kriminalitas dalam masyarakat merupakan patologi sosial dan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram. Selain mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat, perilaku kekerasan secara psikologis juga akan merangsang timbulnya perilaku kekerasan yang lain. Oleh

karena itu, dibutuhkan upaya sistematis dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat.

6. Sementara itu, peredaran minuman keras dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa. Angka nasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari dua juta pecandu narkoba yang 90 persennya adalah generasi muda.

Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan minuman keras dan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani maupun mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.

7. Terus meningkatnya intensitas permasalahan di bidang penegakan hukum khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum memerlukan peningkatan jumlah aparat pemerintah yang terkait dengan hal tersebut. Pada saat ini jumlah dan kualitas anggota Polisi Pamong Praja sebagai penegak ketenteraman dan ketertiban masyarakat bersama unsur aparat keamanan lainnya dirasakan masih sangat kurang.

8. Sejalan dengan gerak laju reformasi pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai dasar pijakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara, serta penerapan tata pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Daerah pada masa mendatang dituntut untuk menyiapkan regulasi perundang-undangan yang implementatif, aspiratif dan demokratis dalam berbagai aspek kehidupan dan pemerintahan.

### **2.2.3. Sosial, Budaya dan Kehidupan Beragama**

#### **A. Pendidikan**

1. Terus meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan termasuk tenaga pendidikan di seluruh wilayah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Di sisi lain kualitas penyelenggaraan pendidikan juga harus terus ditingkatkan demi meningkatkan efektivitas pendidikan formal.
2. Dinamika perubahan struktur penduduk yaitu semakin rendahnya penduduk usia muda akan menyebabkan penurunan siswa SD/MI/SMP/MTS dari tahun ketahun. Pada saat yang sama terjadi peningkatan usia remaja sehingga akan meningkatkan jumlah anak usia sekolah SLTA yang tentu saja mengakibatkan peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana

serta tenaga pendidikan untuk jenjang pendidikan SLTA. Pada saat yang sama juga terjadi peningkatan proporsi penduduk usia dewasa yang dengan sendirinya menuntut peningkatan pelayanan pendidikan nonformal guna meningkatkan keterampilan dan kompetensinya agar semakin mampu memasuki pasar tenaga kerja atau menciptakan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran.

3. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta semakin intensnya dampak globalisasi, maka eksistensi dan kemajuan suatu negara atau daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan daya saing serta jatidiri masyarakat/bangsanya. Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing serta memperkuat jatidiri bangsa, maka peningkatan taraf pendidikan masyarakat mutlak harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kompetensi peserta didik. Untuk itu di samping diperlukan peningkatan penyediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik agar dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan interpersonal sehingga mampu berinteraksi, berkomunikasi, dan mengendalikan diri dalam pergaulan antar sesama, mampu mandiri dan menjaga keharmonisan dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat, memiliki kualitas moral yang baik atau budi

pekerti yang luhur serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan paradigma pendidikan dengan mengarusutamakan arti penting pendidikan budi pekerti dan internalisasi semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta nilai-nilai luhur budaya bangsa antara lain melalui pendidikan budi pekerti dan pendidikan seni budaya.

Selain itu, demi menjawab tantangan jaman maka pada masa-masa mendatang fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga perlu ditingkatkan.

## **B. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Persaingan yang makin tinggi dalam masa mendatang khususnya menghadapi globalisasi, menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan Iptek dalam rangka menghadapi perkembangan regional. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek daerah, maka tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek di sektor industri/produksi, meningkatkan efektifitas mekanisme intermediasi iptek, memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain, mengembangkan budaya iptek dikalangan masyarakat, meningkatkan operasionalisasi iptek

dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan, mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumberdaya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek, melalui lembaga iptek daerah yang handal dan berkualitas.

### **C. Kepemudaan dan Olahraga**

1. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan arus globalisasi, telah menyebabkan semakin kuatnya pengaruh budaya global yang kemudian mengakibatkan berkembangnya semangat materialisme dan hedonisme, melemahnya idealisme, terkikisnya nilai-nilai luhur dan jatidiri bangsa serta semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Di sisi lain, kurangnya upaya pengenalan terhadap budaya bangsa dan penanaman semangat nasionalisme telah semakin menyurutkan kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya dan jatidiri bangsa. Hal yang demikian ini apabila tidak dilakukan upaya yang nyata, bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menanamkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya bangsa dan tanah air, maka dikhawatirkan dimasa yang akan datang secara nasional akan berakibat pada hilangnya eksistensi bangsa.
2. Meningkatnya penggunaan serta jaringan peredaran narkoba dan minuman keras sampai dipelosok desa merupakan ancaman serius terhadap masa depan bangsa. Untuk itu diperlukan upaya

terus menerus untuk membentengi generasi muda dari pengaruh bahaya narkoba dan minuman keras

3. Semakin pesatnya peningkatan prestasi olah raga di tingkat dunia, nasional maupun regional akibat peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembinaan prestasi olah raga merupakan tantangan yang berat bagi kemajuan olahraga di Kabupaten Purbalingga.

#### **D. Kesehatan**

1. Adanya transisi epidemiologi dan kenyataan bahwa penyebaran penyakit menular tidak mengenal batas wilayah, maka perlu diwaspadai berjangkitnya penyakit-penyakit yang sebetulnya bukan endemik di Kabupaten Purbalingga, seperti Malaria; penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi (TBC, Campak, Tetanus, Polio, Diphteri dan Pertusis) dan HIV/AIDS.
2. Adanya perubahan gaya hidup seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan perkapita masyarakat membawa dampak pada perubahan pola konsumsi makanan masyarakat yang pada gilirannya dapat memicu timbulnya penyakit-penyakit degeneratif (Jantung, Hipertensi, Diabetes Mellitus). Untuk itu upaya pembangunan kesehatan di masa yang akan datang selain berorientasi pada upaya penanggulangan penyakit menular juga diarahkan pada upaya peningkatan penanganan penyakit tidak menular (degeneratif).

3. Semakin meningkatnya pencemaran tanah, air dan udara yang diakibatkan oleh aktivitas industri tidak ramah lingkungan, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, serta meningkatnya penggunaan bahan-bahan aditif dikhawatirkan akan semakin memicu peningkatan kejadian penyakit degeneratif pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu dibutuhkan langkah antisipatif terhadap hal tersebut dengan meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian kualitas kesehatan lingkungan, pengawasan peredaran obat, makanan, dan bahan aditif serta upaya peningkatan kualitas pelayanan penanganan penyakit degeneratif.

#### **E. Kependudukan dan KB**

Terus meningkatnya jumlah penduduk merupakan tantangan besar di masa mendatang. Peningkatan jumlah penduduk secara terus-menerus dalam jangka panjang akan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum apabila tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kualitas berbagai prasarana sosial, ekonomi dan pelayanan publik; penyediaan lapangan kerja dan peningkatan tata kelola kehidupan sosial, budaya dan politik.

Di samping itu besarnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan potensi sumberdaya pendukung akan menyebabkan desakan terhadap lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya

alam dan berbagai implikasi dari aktivitas manusia seperti pencemaran lingkungan hidup dan sebagainya. Dengan penurunan kualitas lingkungan hidup dan potensi sumberdaya alam serta keterbatasan kemampuan belanja pemerintah, maka apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu pengendalian laju pertumbuhan penduduk harus menjadi salah satu prioritas pembangunan.

## **F. Kesejahteraan Sosial**

1. Krisis ekonomi tahun 1997 yang berkepanjangan dan masih dirasakan dampaknya hingga saat ini dikhawatirkan akan memberikan dampak jangka panjang. Dampak langsung maupun tidak langsung dari krisis ekonomi dikhawatirkan akan terus dirasakan dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sampai beberapa tahun ke depan. Salah satu dampak dari krisis ekonomi adalah meningkatnya jumlah keluarga miskin. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup pokok bagi keluarga miskin terutama yang berupa pangan, papan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan akan menyebabkan keluarga yang miskin menjadi rentan terhadap penurunan kesehatan yang akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas. Bagi anak-anak keluarga miskin, dengan kurangnya kecukupan kebutuhan pangan dan gizi serta layanan

kesehatan dan pendidikan akan berakibat kurang baik bagi tumbuhkembang, kemampuan daya pikir, dan kecerdasannya sehingga dikhawatirkan akan memberi dampak jangka panjang berupa penurunan kualitas generasi yang akan datang serta akan menjadikan permasalahan kemiskinan semakin sulit untuk diselesaikan.

Di samping dampak langsung yang akan dirasakan dalam jangka panjang, dampak tidak langsung dari krisis ekonomi terutama yang berupa peningkatan angka kriminalitas dan tindak kekerasan dalam masyarakat juga akan berdampak jangka panjang karena pemulihan dalam aspek psikologis sosial akan membutuhkan waktu yang panjang.

2. Permasalahan kesejahteraan masyarakat terutama masalah kemiskinan akan terus menjadi tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang. Masalah kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensi. Dalam perspektif ekonomi, masalah kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin. Dalam perspektif sosial, ada dua aspek penyebab kemiskinan, yakni yang bersifat struktural dan kultural. Penyebab kemiskinan yang bersifat struktural disebabkan tatanan masyarakat, baik tatanan politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun kultural, yang memberikan perlakuan berbeda

terhadap kelompok masyarakat tertentu, sehingga mereka terhalang dalam mengakses sumber daya. Struktur yang lebih berpihak pada yang kuat ini (*betting on the strong*) membuat orang menjadi miskin atau tetap miskin. Untuk mengatasinya, maka dibutuhkan kebijakan pembangunan dalam segala bidang yang secara nyata berpihak kepada rakyat miskin atau memberi kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan. Kondisi kemiskinan yang parah dan berlangsung lama menyebabkan masyarakat miskin mengembangkan sikap mental tertentu. Sikap mental yang merupakan cara adaptasi individu menghadapi tekanan hidup yang keras ini diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga membentuk kebudayaan kemiskinan (*culture of poverty*). Kebudayaan ini ditandai dengan sikap fatalistik dan nrimo. Untuk mengatasinya, maka mentalitas miskin ini harus dikikis. Oleh karena itu, untuk dapat menanggulangi kemiskinan diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang peka kemiskinan yaitu pembangunan ekonomi yang memberi ruang bagi partisipasi seluruh rakyat termasuk kaum miskin dalam proses produksi. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diarahkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya, memperhatikan aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi terutama bagi kaum miskin, pengembangan dan pembinaan

usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan investasi yang memperluas kesempatan kerja dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.

## **G. Kebudayaan dan Kehidupan Beragama**

1. Derasnya arus globalisasi di tengah semakin melemahnya semangat kebangsaan dan cinta tanah air, luruhnya nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pudarnya solidaritas sosial, kekeluargaan, dan semangat gotongroyong, serta kebanggaan atas jati diri bangsa yang semakin terkikis oleh nilai-nilai budaya asing merupakan tantangan berat yang harus diatasi di masa kini dan yang akan datang. Demikian juga, berkembangnya semangat materialisme dan hedonisme, membudayanya korupsi, kolusi dan nepotisme, berkembangnya mentalitas menerabas dan kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, karya, dan inovasi, serta meningkatnya budaya kekerasan, premanisme, dan meningkatnya kriminalitas merupakan tantangan berat yang harus ditangani di masa kini dan yang akan datang melalui upaya yang sistematis dan berkelanjutan melalui pembangunan bidang pendidikan, agama, dan kebudayaan.
2. Berkembangnya sektarianisme yang mendorong eksklusivisme dan radikalisme agama sebagai keinginan pemaksaan dogma agama terhadap orang lain juga merupakan salah satu tantangan yang harus diwaspadai karena akan dapat menimbulkan

disharmoni dalam kehidupan sosial dan bahkan mengancam eksistensi negara kesatuan. Oleh karena itu, pengembangan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama harus selalu mendapatkan perhatian.

3. Adanya pemahaman agama yang masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata merupakan tantangan dalam pembangunan bidang agama. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu menggambarkan adanya kesenjangan antara pemahaman atas teks dan nilai-nilai ajaran agama dengan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu perlu peningkatan pendidikan dan pengembangan kehidupan beragama baik di masyarakat maupun pada tataran formal di berbagai lembaga pendidikan. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan mutu tenaga pendidik, kurang tertatanya kurikulum, terbatasnya sarana dan prasarana, dan kurangnya fasilitas pendukung lainnya.

## **H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Di bidang pemberdayaan perempuan, tantangan yang dihadapi adalah masih timpangnya kesetaraan gender yang antara lain tercermin dari masih rendahnya tingkat pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Relatif rendahnya peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan

menghendaki adanya upaya peningkatan kesetaraan gender agar dimasa mendatang perempuan lebih berdaya.

2. Dengan semakin meningkatnya kesetaraan gender mengakibatkan meningkatnya aktivitas orangtua laki-laki maupun perempuan di luar rumah sehingga menyebabkan berkurangnya intensitas perhatian orangtua dalam mendidik dan mengasuh anak. Di samping itu kecenderungan meningkatnya eksploitasi anak dan masih banyaknya anak-anak terlantar merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian tersendiri. Oleh karena itu pada masa-masa mendatang upaya perlindungan anak harus semakin dilembagakan.

#### **2.2.4. Ekonomi**

1. Dalam tatanan ekonomi terbuka, apalagi dalam era globalisasi, perekonomian suatu daerah atau wilayah tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kondisi perekonomian di wilayah lain maupun perekonomian nasional, atau bahkan perekonomian global. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas lintas batas dan mobilitas sumberdaya yang sangat cepat antar wilayah maupun antar negara akan membawa implikasi terhadap meningkatnya persaingan untuk mendapatkan rente ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi nasional maupun global akan segera membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah. Salah satu

tantangan nyata yang dihadapi daerah pada era globalisasi antara lain adalah masuknya berbagai produk impor yang menjadi pesaing bagi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini tidak dapat dihindari karena Indonesia telah meratifikasi kesepakatan WTO dan pasar bebas ASEAN (AFTA). Di samping itu, penerapan standar ganda dari negara maju sebagai proteksi terhadap masuknya produk luar membawa dampak negatif terhadap pemasaran produk di pasar global. Oleh karena itu, di masa sekarang dan yang akan datang, pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga secara bertahap harus mampu mewujudkan kondisi ekonomi daerah yang tangguh dengan membangun kompetensi inti dan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi pendayagunaan potensi lokal termasuk potensi sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi.

Basis kekuatan ekonomi Kabupaten Purbalingga yang masih mengandalkan sektor primer dengan kualitas yang terbatas dan tidak terstandarisasi serta kapasitas produksi yang berfluktuasi, menjadikannya sulit untuk mampu menembus pasar global atau bahkan pasar modern dalam negeri. Agar perekonomian daerah terus bertumbuh secara berkelanjutan untuk menjamin peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat, maka ke depan basis perekonomian

daerah harus dirubah dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi yang ada antara lain dengan mengembangkan industri pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi sehingga akan meningkatkan nilai tambah dan melibatkan lebih banyak tenaga kerja serta semakin mampu bersaing untuk menembus pasar yang lebih luas.

2. Terus meningkatnya populasi penduduk dari waktu ke waktu akan berakibat pada meningkatnya desakan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat terus meningkatnya eksploitasi terhadap sumberdaya alam. Hal ini akan mengakibatkan degradasi fungsi lingkungan hidup dan terus merosotnya daya dukung sumberdaya alam bagi kelangsungan hidup manusia yang pada akhirnya justru akan dapat menurunkan derajat kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada upaya memacu pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Untuk itu, pembangunan ekonomi harus diorientasikan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Artinya pembangunan ekonomi bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek tetapi pertumbuhan ekonomi yang

dihasilkan dari upaya pembangunan harus terus berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga tidak mewariskan masalah di kemudian hari.

Peningkatan populasi penduduk juga akan membawa konsekuensi pada peningkatan pemanfaatan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman, berbagai prasarana sosial, prasarana perhubungan, dan sebagainya. Oleh karena itu ketersediaan sumberdaya lahan untuk usaha pertanian akan semakin berkurang karena sebagian akan beralih fungsi untuk pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Sementara itu produktivitas pertanian pada suatu saat tidak bisa ditingkatkan lagi karena sudah mencapai titik optimum dan mengalami kejenuhan input. Berdasarkan kenyataan tersebut, apabila perekonomian daerah terus bertumpu pada sektor pertanian, maka pada suatu saat tidak akan mampu bertumbuh. Agar perekonomian daerah terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan peningkatan populasi penduduk dan standar kehidupan manusia, maka perekonomian daerah harus diupayakan agar tidak hanya bertumpu pada sektor primer (pertanian), tetapi harus terus diupayakan agar bergeser ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa). Meskipun demikian, bukan berarti bahwa sektor pertanian harus diabaikan. Sektor pertanian

sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB dan menyerap sebagian besar tenaga kerja merupakan sektor yang strategis, oleh karena itu harus tetap mendapatkan perhatian yang besar.

3. Terus meningkatnya populasi penduduk dari waktu ke waktu akan menyebabkan peningkatan beban ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari upaya pembangunan ekonomi apabila tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk maka tidak akan memberi arti bagi peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi akan menghadapi tantangan yang semakin berat, apalagi dengan semakin menurunnya potensi sumberdaya alam sebagai basis pendukung kehidupan manusia serta semakin kuatnya pengaruh globalisasi.
4. Disamping itu dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi meningkatnya beban untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara lebih merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan perkapita riil seluruh masyarakat apabila tingkat distribusinya mengalami ketimpangan. Pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pertumbuhan bisa jadi hanya akan mendorong berkembangnya industri yang padat modal dan tidak berbasis pada potensi sumberdaya lokal

sehingga kurang berarti dalam mengurangi pengangguran dan kurang memberikan efek multiplier bagi perekonomian rakyat. Di samping itu, berkembangnya industri yang bersifat *footloose* menyebabkan tumbuhnya perekonomian yang rapuh. Oleh karena itu upaya pembangunan ekonomi di samping diarahkan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan populasi penduduk, juga harus diarahkan dalam rangka semakin meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita riil dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

5. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, menuntut tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang memadai. Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, maka upaya pembangunan ekonomi di samping harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga harus ramah tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang ramah tenaga kerja berarti akan semakin membuka dan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, sehingga peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan semakin meningkat. Pada gilirannya, kondisi ini akan meningkatkan kemampuan daya beli dan konsumsi masyarakat, yang secara berantai akan mendorong aktivitas produksi. Aktivitas produksi secara otomatis akan membutuhkan berbagai faktor produksi seperti

bahan baku, tenaga kerja dan sebagainya, sehingga meningkatkan peluang memperoleh pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan sendirinya akan meningkatkan pemerataan pendapatan.

Tingginya angka pengangguran di samping disebabkan kurangnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha juga dapat disebabkan karena rendahnya kualitas SDM tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan atau karena kurangnya relevansi antara kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, tantangan berat kedepan dalam rangka menanggulangi permasalahan pengangguran di samping harus mampu memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara memadai, juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

6. Di bidang ketenagakerjaan tantangan yang akan dihadapi dalam kurun waktu sampai 20 tahun ke depan antara lain adalah situasi dimana pertambahan penduduk masih tergolong tinggi dan rasio penduduk usia produktif diperkirakan mencapai tingkat maksimal akan terjadi pada periode 2020 –2025. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir

dua kali lipat dari kondisi saat ini. Kondisi ketenagakerjaan tahun 2004 menunjukkan sebesar 72,64 persen tenaga kerja berpendidikan SD, tamatan SLTP 14,48 persen dan berpendidikan SLTA 9,63 persen dan yang berpendidikan akademi/universitas hanya sekitar 3,25 persen. Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga relatif lebih buruk dibandingkan ketenagakerjaan nasional dimana tingkat pendidikan tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SD hanya sekitar 50 persen. Dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SLTP dan SLTA. Dengan demikian, kapasitas perekonomian di masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang lebih berkualitas yakni mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak bagi penduduk usia kerja.

#### **2.2.5. Sarana dan Prasarana**

1. Di bidang sarana dan prasarana, tantangan yang dihadapi adalah terus meningkatnya kebutuhan penyediaan dan kualitas prasarana dan sarana sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, kebutuhan meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah, serta peningkatan standar kualitas pelayanan dari tahun ke tahun. Hal

ini menghendaki peningkatan belanja pemerintah di bidang infrastruktur baik untuk keperluan pembangunan maupun pemeliharaan yang tentu saja akan semakin membebani pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang tajam dengan analisis yang cermat sehingga alokasi belanja pembangunan betul-betul efektif dan efisien.

2. Tantangan lain di bidang prasarana adalah meningkatnya kelangkaan air akibat kondisi lingkungan yang semakin mengalami degradasi fungsi. Kerusakan lingkungan yang antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) hulu akibat kerusakan hutan yang tak terkendali telah menyebabkan peningkatan luasan lahan kritis. Fenomena ini telah menyebabkan turunnya kemampuan DAS untuk menyimpan air di musim kemarau sehingga frekuensi dan besaran banjir makin meningkat, demikian juga sedimentasi makin tinggi yang menyebabkan pendangkalan di sungai sehingga menurangi daya tampung dan pengalirannya.

Penggunaan air yang besar dan tidak terkontrol akan menyebabkan menurunnya ketahanan pangan. Demikian juga penggunaan air irigasi berlebihan di daerah hulu berpotensi menjadikan daerah hilir kekurangan pasokan air, dan menjadikan kecenderungan peningkatan potensi konflik

pemanfaatan air. Oleh karena itu sangat dibutuhkan berbagai bangunan dalam rangka konservasi sumberdaya air khususnya normalisasi aliran sungai yang telah banyak berubah akibat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali, serta upaya penghijauan dan reboisasi.

3. Sementara itu, penurunan fungsi hutan lindung dan daerah tangkapan air akan terus menyebabkan penurunan debit air pada mata air yang selama ini menjadi sumber air bersih. Sedangkan di sisi lain kebutuhan air bersih untuk keperluan rumahtangga, aktivitas sosial maupun ekonomi dipastikan akan terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menghendaki adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan air bersih antara lain melalui peningkatan kualitas jaringan pengaliran pada PDAM serta kualitas pengelolaan air oleh masyarakat.
4. Terus meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan terus meningkatnya kebutuhan pemakaian listrik dari waktu ke waktu baik untuk keperluan rumahtangga, aktivitas sosial, maupun ekonomi di tengah terus menurunnya kapasitas pasokan listrik dari PLN merupakan tantangan tersendiri di masa mendatang. Di sisi lain, kondisi topografi wilayah Kabupaten Purbalingga yang sebagian besar berbukit-bukit menjadi kendala karena sistem

interkoneksi belum dapat sepenuhnya menjangkau ke seluruh wilayah. Oleh karena itu, pada masa mendatang perlu terus dilakukan upaya pengembangan sumber energi non PLN antara lain melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), pengembangan sumber energi alternatif antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta pengembangan potensi energi baru yang terbarukan (EBT) lokal.

5. Tantangan terbesar pada masa sekarang dan yang akan datang adalah pemenuhan kebutuhan rumah. Dengan asumsi bahwa satu rumah tangga memiliki satu unit rumah, maka diperkirakan *backlog* di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 mencapai 172.011 unit. Dengan mempergunakan angka laju pertumbuhan penduduk kabupaten sebesar 0,85 persen per tahun sebagai dasar proyeksi, maka kebutuhan rumah layak huni pada tahun 2015 akan membengkak menjadi 187.205 unit dan 203.740 unit pada tahun 2025. Tanpa adanya terobosan kebijakan dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan perumahan, maka jumlah kekurangan rumah akan terus terakumulasi, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, rawan miskin, miskin, dan sangat miskin.

6. Terus meningkatnya jumlah penduduk terutama di perkotaan pada masa-masa mendatang dipastikan akan menyebabkan permasalahan permukiman menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, guna mengantisipasi permasalahan permukiman di masa yang akan datang, sejak dini perlu adanya perencanaan yang komprehensif berkaitan dengan pembangunan permukiman sehingga di masa sekarang maupun yang akan datang permasalahan permukiman bisa ditanggulangi. Hal yang mendesak untuk dilaksanakan adalah perencanaan dan penataan bergai kebutuhan permukiman seperti sistem penanganan sampah, jaringan jalan lingkungan, jaringan pembuangan air limbah, drainase, dan sebagainya, termasuk penyediaan fasilitas peribadatan dan ruang terbuka. Tanpa adanya perencanaan yang baik dalam bidang permukiman dikhawatirkan di masa mendatang akan terus berkembang kawasan kumuh. Peningkatan luas kawasan kumuh tidak dapat dipandang hanya sebagai penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*) belaka, namun juga harus dipandang sebagai penurunan kualitas kehidupan manusia dan kualitas sosial.
7. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi dampak perkembangan wilayah perkotaan yang terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan peningkatan berbagai prasarana pelayanan umum

dan permukiman, maka kebutuhan drainase yang berfungsi untuk menyalurkan air limpasan yang tidak terserap ke dalam tanah (*run off*) di Purbalingga masih perlu untuk terus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh sebelum timbul permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.

8. Pesatnya kemajuan teknologi, terutama sektor telematika yang merupakan konvergensi telekomunikasi, Teknologi Informasi (TI), dan multimedia memungkinkan setiap individu untuk berinteraksi secara maya (*virtual*) tanpa mengenal batas-batas teitorial (*borderless*). Globalisasi telah menempatkan Kabupaten Purbalingga sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, namun demikian jumlah infrastruktur telematika masih belum memadai untuk mendukung daya saing daerah.

#### **2.2.6. Wilayah dan tata Ruang**

1. Masih adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan antar wilayah terutama antara wilayah perdesaan dan perkotaan akibat adanya perbedaan kondisi alamiah dan potensi wilayah merupakan tantangan yang harus dapat diatasi. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi (jalan, pasar, perbankan, telekomunikasi, listrik, dan sebagainya) yang mendukung peningkatan produksi dan distribusi produk serta berbagai prasarana sosial harus terus dilakukan terutama untuk

membuka dan meningkatkan akses masyarakat dalam pendayagunaan potensi ekonomi lokal dan aktivitas ekonomi pada umumnya serta untuk menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Demikian juga dalam rangka meningkatkan akses seluruh masyarakat terutama di wilayah perdesaan terhadap pelayanan sosial yang semakin berkualitas perlu disediakan berbagai prasarana dan sarana soaial di seluruh wilayah terutama di bidang kesehatan dan pendidikan secara memadai. Hal ini penting dalam rangka menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk mendorong peningkatan serta pemerataan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

2. Penataan ruang juga merupakan tantangan berat yang harus dihadapi pada masa sekarang dan yang akan datang. Ketersediaan sumberdaya ruang bersifat statis, sementara populasi manusia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, maka pemanfaatan ruang harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik, agar di masa mendatang tidak terjadi konflik dan bencana bagi manusia. Hal ini dapat diakibatkan karena ketidakseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan tingkat eksploitasinya.
3. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya intensitas aktivitas manusia dari waktu ke waktu, maka akan terus terjadi kecenderungan penyimpangan pemanfaatan ruang

serta penurunan fungsi ruang, tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan antara lain meliputi kawasan lindung, kawasan resapan air, kawasan budidaya, kawasan permukiman, kawasan industri, serta kawasan-kawasan khusus seperti kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan sebagainya. Penataan ruang yang meliputi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang pada saat ini masih belum optimal harus dibenahi secara berkelanjutan dan sinergis. Demikian juga dokumen-dokumen penataan ruang yang baru sebagai revisi maupun sebagai pelengkap dokumen yang sudah ada perlu disusun melalui kajian dan analisis yang mendalam agar dapat digunakan sebagai panduan dalam pemanfaatan ruang yang ideal. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat penyimpangan dokumen perencanaan ruang yang telah disusun, maka perlu dilakukan kajian terhadap dokumen-dokumen tersebut secara berkala.

### **2.2.7. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**

1. Dengan menelaah kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak dilakukan upaya antisipasi melalui kebijakan dan tindakan yang tepat dalam konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi krisis sumberdaya alam di masa yang akan datang.

2. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya serta rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai pada musim kemarau serta pasokan air untuk pertanian dan kebutuhan lain.
3. Sementara itu, kelangkaan ketersediaan energi tak terbarukan juga terus terjadi, karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah dengan menciptakan sumber energi alternatif.
4. Terus menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas manusia, merupakan tantangan yang besar di bidang lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan

lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, kemerosotan hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan-lahan rusak termasuk *deforestasi*, terjadi banjir dan tanah longsor pada musim penghujan, sulit mendapatkan air pada musim kemarau, aliran sungai yang berpindah dan sebagainya. Untuk menantisipasi hal tersebut dibutuhkan kebijakan yang bersifat regulatif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan oleh adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang yang memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari, di samping upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna di

dalamnya menjadi bagian integral dalam membangun daya saing Purbalingga.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara benar dimasa mendatang sangat tergantung dengan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang ditentukan oleh kemampuan SDM, organisasi dan institusi untuk melaksanakan berbagai kebijakan pengelolaan (aturan, termasuk norma dan etika). Komponen-komponen penentu bagi kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini secara komprehensif sangat perlu untuk terus ditingkatkan kemampuannya. Semua ini diperlukan untuk mengejar berbagai ketertinggalan ataupun kegagalan karena telah dilaksanakannya praktek-praktek yang salah terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Kondisi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan merupakan kelemahan yang masih dirasakan dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Konsep *good environmental governance* harus menjadi dasar dalam implementasi pengelolaan lingkungan hidup. *Governance* berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.

### **2.3. MODAL DASAR**

Modal dasar pembangunan Kabupaten Purbalingga adalah keseluruhan sumber kekuatan, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan dapat didayagunakan dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga, yaitu:

1. Letak geografis Kabupaten Purbalingga yang ada pada ketinggian antara 300 meter sampai dengan 3.500 meter di atas permukaan laut memberikan keragaman potensi alam yang dapat dikembangkan dalam rangka mendorong perekonomian daerah yang meliputi usaha budidaya berbagai jenis komoditas pertanian, pengembangan kepariwisataan, serta industri yang berbasis pertanian.
2. Penduduk dengan jumlah yang besar merupakan sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah.
3. Budaya masyarakat yang terbuka dan demokratis serta situasi daerah yang kondusif memberikan iklim yang favourable bagi berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi.
4. Komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Hubungan kemitraan yang kooperatif dan sinergis antara lembaga legislatif dan eksekutif sangat mendorong

terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

6. Tersedianya berbagai infrastruktur penunjang merupakan modal yang sangat berharga untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di masa mendatang.

## **BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005–2025**

### **3.1. VISI**

Berdasarkan kondisi Kabupaten Purbalingga saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga, maka Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 adalah:

**PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA  
SAING MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN  
BERAKHLAK MULIA**

Kemandirian daerah adalah kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Pengertian mandiri di sini berarti tidak selalu tergantung kepada pihak lain tetapi bukan berarti lepas atau tidak ada hubungan sama sekali dengan lingkungannya. Jadi maksud dari visi “Purbalingga yang mandiri” adalah bahwa dengan keuletan dan kerja keras masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkannya sendiri, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan terhadap pihak-pihak lain secara setahap demi setahap semakin dapat dikurangi. Disamping itu, perlu terus diusahakan agar kemampuan pembiayaan pembangunan Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui upaya-upaya yang tidak kontra produktif, tetapi justru memacu perekonomian rakyat.

Maksud dari “berdaya saing” adalah bahwa dengan kemandiriannya tidak menjadikan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengisolasi diri dari pengaruh dan perkembangan serta dinamika lingkungannya sehingga menjadikannya tertinggal dibanding dengan lingkungannya. Sebaliknya masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus senantiasa berupaya meningkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sehingga mampu mengikuti dinamika dan mampu bersaing dengan lingkungannya dalam era otonomi daerah dan globalisasi yang antara lain ditandai dengan perdagangan bebas.

Maksud dari “sejahtera” adalah bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera di sini bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan

material, melainkan juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Sedang maksud dari “berakhlak mulia” adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas moral spiritual masyarakat. Kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai juga mencakup dimensi mental – spiritual, keagamaan, dan kebudayaan agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin.

### **3.2. MISI**

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik** yang mengarah pada upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang semakin semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel. Melalui misi ini juga dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki strategi yang jelas; mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan admisnitrasi publik dan penyelenggaraan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat;

mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat. Pemerintah juga dituntut untuk semakin dapat mewujudkan keadilan dan menegakkan hak asasi manusia.

2. **Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum** yang mengarah pada upaya mewujudkan rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan masyarakat dengan mengeliminasi ketegangan dan ancaman konflik, menurunkan angka kriminalitas, serta meningkatkan ketertiban umum; mengembangkan semangat kebangsaan, patriotisme, dan cinta tanah air; mewujudkan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis; memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; mengembangkan budaya hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
  
3. **Mewujudkan Manusia Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Beretika, Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme serta Cinta Tanah Air** dengan membangun manusia Purbalingga yang mencakup aspek jasmani, rohani, moral, spiritual, mental, religi dan intelektual yang dilakukan

dengan meningkatkan taraf pendidikan, derajat kesehatan, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan sosial, keadilan gender, perlindungan anak dan keberdayaan masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan serta mengembangkan kehidupan beragama dan meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat; meningkatkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama; mengembangkan kesetiakawanan sosial, toleransi, dan budaya demokrasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat; memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa; meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan kebudayaan termasuk terhadap budaya lokal untuk mengembangkan kepekaan emosional dan meningkatkan kualitas moral dan intelektual masyarakat serta memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan daerah.

- 4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan** yang dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup pokok; pengembangan, peningkatan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi rakyat; perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja; serta melakukan berbagai upaya dalam rangka memperkokoh struktur ekonomi daerah dengan meningkatkan peran sektor industri dan jasa.

5. **Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah** yang diarahkan untuk semakin mendorong akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana perhubungan; irigasi dan pengairan; perumahan dan permukiman; prasarana energi dan telekomunikasi; serta berbagai prasarana pelayanan sosial; ekonomi; pemerintahan; prasarana perkotaan dan prasarana wilayah lainnya.
  
6. **Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup** meliputi berbagai upaya perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup agar dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertahankan daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia, termasuk memelihara kenyamanan kehidupan manusia di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi dan terkendali; konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; serta rehabilitasi lingkungan hidup yang telah mengalami degradasi fungsi akibat eksploitasi sumberdaya alam dan pencemaran.

**BAB IV.**  
**ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS**  
**PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN**  
**2005–2025**

**4.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN**

Sesuai dengan Visi Kabupaten Purbalingga, secara garis besar tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai ukuran terwujudnya Kabupaten Purbalingga yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia, pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

**A. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik**, yang ditandai oleh:

1. Terwujudnya aparatur negara yang profesional, bersih dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal.
3. Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan admisnitrase publik dan penyelenggaraan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumberdaya pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**B. Terwujudnya Purbalingga yang Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum**, yang ditandai oleh :

1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. di segala bidang, menurunnya angka pelanggaran hukum, rendahnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat, meningkatnya

kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

2. Tersusunnya produk-produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan akselerasi pembangunan.
3. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.
4. Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik sehingga akan semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

**C. Mewujudkan Manusia Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Beretika, Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme serta Cinta Tanah Air, yang ditandai oleh :**

1. Meningkatnya kualitas manusia yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan daya beli masyarakat, serta terwujudnya kesetaraan gender yang secara umum diukur dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan meningkatnya kualitas intelektual, berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama, berkembangnya budaya baca tulis, terwujudnya kesetaraan gender, meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial, serta berkembangnya semangat gotongroyong sehingga akan dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan sosial.
3. Semakin kokohnya jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga yang tercermin dengan berkembang dan meningkatnya apresiasi terhadap budaya yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa.
4. Meningkatnya semangat dan wawasan kebangsaan.

**D. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan** yang ditandai oleh :

1. Terpenuhinya kebutuhan hidup pokok berupa pangan, papan, dan sandang bagi seluruh masyarakat secara memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya, serta tersedianya berbagai fasilitas kebutuhan penunjang seperti air bersih; prasarana mandi, cuci dan kakus (MCK); dan prasarana permukiman lainnya. Untuk itu, ketahanan dan kemandirian pangan harus mampu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.
2. Meningkatnya pendapatan per kapita riil masyarakat yang semakin merata untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara memadai dengan tingkat pengangguran yang rendah dan penduduk miskin tidak lebih dari 5 (lima) persen melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkesinambungan.
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga di mana sektor pertanian dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan produk berkualitas dengan nilai

tambah dan daya saing yang tinggi; sementara peran sektor industri dan jasa terus meningkat dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah yang tinggi dan berdaya saing.

4. Meningkatnya investasi swasta yang mampu menyerap tenaga kerja dan ramah lingkungan baik investasi dalam negeri maupun investasi asing (*foreign direct investment*) dalam rangka menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah yang memadai sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja serta untuk menanggulangi kemiskinan.

**E. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah** yang ditandai oleh :

1. Tersedianya infrastruktur yang memadai dan terintegrasi satu sama lain sehingga mampu mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang meliputi prasarana perhubungan, irigasi, dan air bersih, terpenuhinya pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, serta terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern untuk mewujudkan masyarakat informasi.
2. Terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk mewujudkan pemerataan tingkat kesejahteraan

masyarakat di seluruh wilayah antara lain melalui penyediaan infrastruktur serta berbagai prasarana dan sarana sosial dan ekonomi untuk mendorong aksesibilitas dan perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi di seluruh wilayah sehingga tidak muncul disparitas kesejahteraan dan kemajuan antar wilayah terutama antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

**F. Terwujudnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup,**  
ditandai oleh :

1. Tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumberdaya alam dan dampak aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat melalui perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam.
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **4.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025**

Untuk mewujudkan daya saing, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat, serta membangun masyarakat yang berakhlak mulia, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

### **A. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**

Penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal agar mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan tantangan sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Sejalan dengan hal tersebut, demi menjawab tuntutan reformasi dan demokratisasi serta kebutuhan untuk semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka mutlak diperlukan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, pembangunan bidang pemerintahan Kabupaten Purbalingga dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan cara: (1) meningkatkan efektivitas

pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; (2) mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, produktif, dan bertanggung jawab; dan (3) meningkatkan fungsi kehumasan sebagai media komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

2. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, memiliki strategi yang jelas, responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan penyelenggaraan pembangunan dengan mengembangkan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, mengembangkan perencanaan dari bawah dan mengoptimalkan fungsi perencanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan mampu mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat serta mampu memberi kontribusi bagi pencapaian sasaran, tujuan, dan visi pembangunan Kabupaten Purbalingga.
3. Mewujudkan pemerintahan yang mampu menggerakkan partisipasi rakyat dengan melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum agar masyarakat semakin dapat

menemukan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya, semakin meningkatkan prakasrsa dan peransertanya dalam pembangunan, serta semakin dapat bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah.

4. Mewujudkan pemerintahan yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh komponen masyarakat, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memberikan kritik bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk berperanserta dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, harus diwujudkan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan melalui : (1) penataan kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara efektif, efisien, dan responsif sesuai dinamika organisasi dan lingkungan eksternal, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemeritahan; (3) peningkatan kapasitas dan penataan sumber daya aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; serta (4) peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan kemampuan dan prestasi.

5. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang solid dan netral secara politis serta berkemampuan dalam mengimbangi dan mengikuti dinamika politik nasional dan daerah sehingga tetap dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal serta dapat memberikan kontribusi bagi terpeliharanya iklim politik yang kondusif.

## **B. Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum**

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tercantum dalam visi Kabupaten Purbalingga, tidak cukup dengan memenuhi kebutuhan yang bersifat lahiriah, melainkan juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, harga diri, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Oleh karena itu salah satu misi yang akan dilaksanakan dalam pembangunan jangka panjang adalah menciptakan Purbalingga yang aman, damai dan demokratis berlandaskan hukum.

Untuk menciptakan Purbalingga yang aman, damai dan demokratis berlandaskan hukum, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam jangka panjang meliputi :

1. Pengembangan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum dan budaya hukum melalui pendidikan

formal, non formal, dan informal, serta melalui penyuluhan dan keteladanan pemimpin formal dalam praktik kehidupan sehari-hari.

2. Pengembangan ketertiban umum dan peningkatan keamanan melalui upaya penegakan hukum, penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas umum dan kualitas pelayanan umum serta peningkatan manajemen fasilitas pelayanan umum; penerbitan dan revisi produk hukum daerah sesuai dinamika sosial, ekonomi, dan tuntutan kebutuhan.
3. Pengembangan kehidupan politik yang diarahkan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik rakyat dan mengembangkan etika politik serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga politik antara lain melalui berbagai upaya pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat khususnya bagi generasi muda; mengembangkan komunikasi politik antara pemerintah, kekuatan politik dan masyarakat secara intens dan egaliter; menyelenggarakan Pemilu secara demokratis, jujur, dan adil; mengembangkan tradisi demokrasi dan nilai-nilai demokrasi dalam segala jenjang dan aspek kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pendidikan formal; fasilitasi lembaga-lembaga politik agar

dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal; serta menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

### **C. Mewujudkan Manusia Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Beretika, Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme serta Cinta Tanah Air**

Tujuan sebenarnya dari segala upaya pembangunan adalah membangun manusia agar dapat diwujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia. Dalam paradigma pembangunan manusia, berbagai upaya pembangunan dimuarakan pada peningkatan kualitas manusia termasuk di dalamnya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan manusia. Dalam perspektif manusia Indonesia, manusia yang berkualitas dicirikan dengan derajat kesehatan yang tinggi, taraf pendidikan yang memadai, kualitas intelektual dan moral, tingkat apresiasi terhadap budaya bangsa, pemahaman serta penghayatan terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa, kecintaan terhadap tanah air dan semangat nasionalisme, penghayatan dan pengamalan nilai ajaran agama, serta perilaku sosial dan perilaku politik yang sesuai etika. Sejalan dengan hal tersebut, arah pembangunan manusia Purbalingga meliputi :

1. Peningkatan kemampuan dan daya saing seluruh manusia Purbalingga termasuk kaum perempuan dalam era globalisasi agar mampu menyelenggarakan kehidupannya secara layak

dan mandiri yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

2. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia Purbalingga sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi dengan tetap berlandaskan pada norma dan etika yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai universal kemanusiaan yang diselenggarakan secara efisien dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan mencakup pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal dipedesaan dan penyandang cacat. Bersamaan dengan itu harus dilakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan termasuk meningkatkan kebutuhan kompetensi dan meningkatkan kualitas pribadi anak didik agar mampu menghasilkan manusia yang di samping memiliki kemampuan akademik atau penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan juga menghasilkan manusia yang memiliki kemampuan interpersonal agar mampu berinteraksi, berkomunikasi, dan mengendalikan diri dalam pergaulan antar sesama sehingga mampu mandiri dan menjaga

keharmonisan dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan yang berkualitas juga diarahkan untuk menghasilkan anak didik yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan juga harus semakin relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan kebutuhan pembangunan sehingga tidak menambah angka pengangguran dan semakin mendorong akselerasi pembangunan di sektor lain.

Untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan diperlukan peningkatan penyediaan dan kualitas prasarana, sarana dan tenaga pendidik serta peningkatan kualitas manajemen pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan semakin efisien. Bersamaan dengan itu juga dikembangkan pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyempurnaan kebijakan daerah di bidang pendidikan.

3. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan teknologi khususnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah.

4. Pembinaan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan dalam rangka pembinaan mental dan peningkatan semangat sportifitas di kalangan generasi muda, di samping demi meningkatkan kesehatan jasmani dan meningkatkan prestasi. Melalui upaya pembinaan yang intensif dan sistematis serta berkesinambungan, diharapkan juga akan dapat meningkatkan prestasi olahraga dapat berbicara pada tingkat regional maupun nasional sehingga dapat mengharumkan nama daerah atau bahkan nama bangsa di dunia internasional. Rendahnya budaya olahraga di masyarakat akan mempengaruhi kehidupan di masa mendatang.
5. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan SDM kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, dan kemajuan iptek, dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor.
6. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk diarahkan untuk mengendalikan tingkat kelahiran penduduk dengan cara meningkatkan kepesertaan KB khususnya peserta yang

menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) baik perempuan maupun laki-laki, serta penundaan perkawinan bagi generasi muda melalui upaya sosialisasi dan promosi kesehatan reproduksi remaja, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring KB.

Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk diharapkan akan mengurangi terus meningkatnya desakan terhadap lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia tetap dapat dipertahankan agar manusia tetap dapat melangsungkan kehidupannya secara layak. Di samping itu, dengan terkendalnya laju pertumbuhan penduduk maka beban pemerintah dalam rangka menyediakan berbagai fasilitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlalu berat.

Pembangunan Keluarga Berencana diarahkan dalam rangka mengurangi beban keluarga serta meningkatkan kemampuan keluarga yang di dalamnya juga terdapat upaya pemberdayaan keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga ditentukan oleh berapa besar pengeluaran yang harus ditanggung sebuah keluarga dan berapa besar kemampuan keluarga. Hal ini ditentukan oleh seberapa banyak anggota keluarga yang harus dihidupi serta perbandingan antara anggota keluarga yang produktif dengan anggota keluarga yang tidak produktif.

Kemampuan keluarga yang dimaksud adalah seberapa besar kemampuan keluarga untuk mengakses berbagai sumberdaya baik sumber daya sosial maupun sumber daya ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya.

7. Pemberdayaan masyarakat diarahkan dalam rangka meningkatkan prakarsa dan peranserta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan dan prioritas dalam aktivitas sosial dan ekonominya. Kurangnya peran dan kemandirian masyarakat menyebabkan rapuhnya landasan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga hasil pembangunan yang nampak di permukaan tidak didukung oleh landasan yang kokoh. Hal ini menyebabkan rentannya kondisi kehidupan masyarakat terhadap berbagai goncangan.
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan serta meningkatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, memperkuat kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender dan anak, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di semua jenjang

perencanaan pembangunan serta menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

9. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan bidang kehidupan lainnya; terjaminnya pemenuhan kebutuhan hidup pokok, bantuan sosial bagi korban bencana alam; serta meningkatkan mutu, manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan bagian dari rakyat yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah selaku penyelenggara negara. Kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang pada umumnya kurang mampu menyelenggarakan kehidupannya secara layak dan bermartabat akibat kondisi fisik biologis, ekonomi, sosial, maupun kondisi alamiah yang melingkupinya menyebabkannya perlu mendapatkan intervensi dari pemerintah. Peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain dapat berupa bantuan dan santunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bantuan modal dan advokasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi, advokasi hukum, rehabilitasi fisik atau psikologi dan sebagainya.

10. Pengembangan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat diarahkan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menemukan kebutuhan dan permasalahan serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi; mampu mengakses berbagai informasi dan sumberdaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya; dan mengetahui hak-haknya di depan hukum dan hak-hak politiknya agar mampu bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, serta mampu berprakarsa, berperanserta, dan berswadaya dalam pembangunan, sehingga masyarakat menjadi semakin mandiri, tidak senantiasa tergantung kepada intervensi pemerintah.

11. Penanggulangan kemiskinan diarahkan dalam rangka pencegahan pewarisan kemiskinan dari keluarga miskin kepada keturunannya, pencegahan timbulnya keluarga miskin baru, serta pengentasan keluarga miskin.

Kemiskinan akan menyebabkan kurangnya kemampuan mengakses berbagai sumberdaya dan kurangnya kemampuan mengakses berbagai sumberdaya baik sumberdaya ekonomi maupun sumberdaya sosial akan menyebabkan kemiskinan. Keluarga yang miskin potensial untuk melahirkan keturunan yang miskin pula akibat rendahnya kualitas dan kapasitas

manusia yang diturunkan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan mata rantai yang tidak terputus. Untuk dapat memutus rantai kemiskinan maka mutlak diperlukan intervensi dari luar guna memberikan kekuatan kepada keluarga miskin untuk dapat keluar dari kemiskinannya atau setidaknya tidak ‘mewariskan’ kemiskinannya tersebut kepada keturunannya. Salah satu pihak yang mestinya memiliki kompetensi dan kewajiban untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang multi kompleks ini adalah Pemerintah.

Rendahnya daya beli keluarga miskin menyebabkan kemampuannya memenuhi kebutuhan hidup menjadi rendah, baik kebutuhan pokok seperti pangan, papan, dan sandang, maupun kebutuhan lain seperti pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Akibat rendahnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, maka kualitas manusia yang diturunkan dikhawatirkan juga rendah. Dengan demikian, anak-anak keluarga miskin sangat potensial menjadi miskin juga. Untuk mencegah pewarisan kemiskinan, maka diperlukan upaya intervensi terhadap keluarga miskin meliputi pemenuhan kebutuhan hidup pokok bagi keluarga miskin terutama pangan dan papan; pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan; serta pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh pendidikan bagi keluarga miskin.

Untuk mencegah timbulnya keluarga miskin baru, maka pembangunan harus semakin memberi ruang bagi partisipasi seluruh rakyat termasuk kaum miskin dalam proses produksi dan distribusi. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diarahkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya, memperhatikan aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi terutama bagi kaum miskin, pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan investasi yang memperluas kesempatan kerja dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.

Pengentasan keluarga miskin dapat dilakukan apabila terdapat situasi kondusif yang memungkinkan keluarga miskin melakukan berbagai aktivitas dan upaya untuk mengembangkan kehidupannya. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dengan memberikan bantuan atau subsidi dalam pemenuhan kebutuhan pangan, papan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan; serta upaya pemberdayaan keluarga miskin di bidang sosial, ekonomi, dan bidang lainnya.

Mengingat kompleksitas permasalahan kemiskinan, maka untuk dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan tidak mungkin dilaksanakan secara intstant dan parsial melalui satu atau

beberapa program. Kemiskinan hanya dapat ditanggulangi melalui keseluruhan upaya pembangunan yang meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pemerintahan (pelayanan publik), infrastruktur, lingkungan hidup dan sebagainya. Artinya upaya pembangunan di berbagai bidang secara keseluruhan harus berpihak kepada kaum miskin (pro poor).

Di bidang sosial, pembangunan harus semakin membuka akses kaum miskin terhadap sumberdaya sosial dan memberikan perlindungan sosial kepada kaum miskin untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas individu penduduk miskin serta mewujudkan kesetaraan kaum miskin untuk mendapatkan pelayanan dan berpartisipatif dalam segala bidang kehidupan dalam rangka memberdayakan penduduk miskin agar memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berpartisipatif dan mempengaruhi berbagai kebijakan berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapinya. Di bidang budaya, pembangunan harus semakin mendorong kesetaraan kaum miskin dalam stratifikasi sosial, mengikis feodalisme, mengurangi budaya tidak produktif dan sebaliknya mendorong berkembangnya budaya produktif. Untuk itu, dibutuhkan berbagai kebijakan pembangunan di bidang-bidang sosial yang peka kemiskinan yang meliputi

bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, politik, hukum, moral agama, dan sebagainya.

12. Pembangunan moral dan keagamaan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama sehingga akan dapat diwujudkan sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai agama dan memantapkan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etik dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan, kebangsaan, dan kenegaraan, serta untuk meningkatkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama. Untuk itu diperlukan peningkatan pelayanan kehidupan beragama yang berupa penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan agama dan fasilitas peribadatan, peningkatan pelayanan pelaksanaan ibadah, serta peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat yang dinamis.
13. Pembangunan kebudayaan dilaksanakan seiring dengan pembangunan pendidikan diarahkan dalam rangka pelestarian dan internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas moral dan etika masyarakat sekaligus sebagai penangkal penetrasi nilai budaya

asing yang kurang menguntungkan bagi pembangunan karakter bangsa; pengembangan nilai budaya produktif, budaya membaca dan budaya menulis; peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya; pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal yang bermanfaat untuk memperkokoh jatidiri bangsa serta membangun identitas dan kebanggaan terhadap daerah.

14. Pengembangan wawasan dan semangat kebangsaan melalui pengenalan pluralitas sosial, budaya, dan geografis negara Indonesia serta internalisasi nilai-nilai nasionalisme terutama bagi generasi muda dalam pendidikan formal, non formal, dan informal termasuk dalam praktik kehidupan sehari-hari.

#### **D. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan**

Pembangunan ekonomi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga akan meningkatkan kemampuan akses masyarakat terhadap berbagai sumberdaya termasuk sumberdaya sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dan kehidupannya. Secara umum, arah pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan per kapita riil masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu diperlukan transformasi bertahap dari perekonomian yang berbasis keunggulan komparatif sumberdaya lokal, menjadi perekonomian yang memiliki keunggulan kompetitif. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas, peningkatan kualitas produk, serta peningkatan akses pasar melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan inovasi iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan mengelola secara berkelanjutan sumberdaya lokal sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.

Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan peka kemiskinan yaitu pembangunan ekonomi yang memberi ruang bagi partisipasi seluruh rakyat termasuk kaum miskin dalam proses produksi serta memperhatikan kepentingan masyarakat banyak sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai dan pemerataan pendapatan per kapita serta mendorong upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak hanya diarahkan dalam rangka

memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya, memperhatikan aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi terutama bagi kaum miskin, pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan investasi yang memperluas kesempatan kerja dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah serta ramah lingkungan.

Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga dan mengembangkan iklim persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; serta mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga akan semakin memperkuat basis ekonomi daerah.

Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan ekonomi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta kegiatan perdagangan yang sehat dan jasa-jasa pelayanan yang efektif dengan menerapkan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud perekonomian yang tangguh.

Struktur ekonomi yang selama ini selalu bertumpu pada sektor pertanian harus diupayakan agar terus bergeser dengan meningkatkan peran sektor industri dan jasa. Terus meningkatnya penggunaan lahan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk permukiman, berbagai fasilitas pelayanan sosial, pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur, dan sebagainya, telah menyebabkan merosotnya potensi sumberdaya lahan yang selama ini dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Di sisi lain, sifat usaha pertanian yang cenderung menunjukkan respon kenaikan hasil yang semakin menurun terhadap penambahan faktor produksi menyebabkan usaha pertanian pada suatu saat tidak dapat lagi ditingkatkan produktivitasnya akibat kejenuhan input, sehingga apabila perekonomian daerah terus bertumpu pada sektor pertanian, pada suatu saat tidak dapat lagi bertumbuh.

Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi di perdesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.

Pembangunan wilayah perdesaan didorong melalui pengembangan kawasan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian; peningkatan kapasitas SDM perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menunjang antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan; peningkatan akses informasi dan pemasaran; pengembangan lembaga keuangan; perluasan kesempatan kerja; pengembangan teknologi dalam rangka menunjang efisiensi dan efektivitas produksi serta peningkatan kualitas produk; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya agar aktivitas ekonomi perdesaan tidak semata-mata mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan

perdagangan produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

2. Pengembangan iptek untuk menunjang pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek dalam rangka mendukung daya saing produk lokal. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi melalui pengembangan dan inovasi teknologi terapan yang murah dan berkualitas serta penerapan standar mutu.
3. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja termasuk pekerja informal; pasar kerja yang fleksibel; hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja; keselamatan kerja yang memadai; serta terwujudnya proses penyelesaian permasalahan perburuhan yang memuaskan semua pihak. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan melalui pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM. Pekerja juga harus dibekali dengan pengakuan

kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

Pembangunan ketenagakerjaan juga diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi, meningkatkan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas SDM pencari kerja melalui upaya pelatihan ketrampilan, meningkatkan program pendukung pasar kerja, memperbaiki kebijakan daerah yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja baik internal maupun eksternal, serta memperbaiki hubungan industrial.

4. Pengembangan investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkualitas dan berkelanjutan yaitu mampu meningkatkan pendapatan per kapita yang terdistribusi dengan baik dan ramah lingkungan dengan semakin luasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Pengembangan investasi dilakukan dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik, mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah serta meningkatkan penyediaan dan kapasitas infrastruktur penunjang secara memadai.

Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas didorong agar mampu bersaing di pasar regional, nasional dan internasional

serta untuk memperkuat basis produksi dalam rangka memperkokoh perekonomian daerah. Besarnya peran sektor pertanian dalam struktur perekonomian daerah dan besarnya proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian menjadikan sektor pertanian memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian daerah khususnya di perdesaan. Pembangunan sektor pertanian menempati kedudukan yang sangat strategis karena perkembangan sektor pertanian akan sangat terkait dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani. Untuk itu harus dilakukan peningkatan produksi, produktivitas, peningkatan kualitas produk dan efisiensi usaha pertanian melalui modernisasi proses produksi dan penanganan pasca panen, revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha, serta spesialisasi produk unggulan berdasarkan kondisi agroekologis wilayah dan nilai ekonomi produk agar mampu meningkatkan daya saing untuk merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha.

5. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar regional, nasional maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta terkait dengan perekonomian daerah sehingga akan mendorong perkembangan ekonomi di daerah terutama di wilayah perdesaan. Struktur industri harus diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah yang sehat, mampu tumbuh dan terintegrasi dengan industri hilir dan dengan industri berskala besar.

Industri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan komparatif dan kompetitif. Hal ini mengingat terbatasnya ketersediaan dan kualitas sumberdaya lokal. Untuk itu, pembangunan industri selama 20 tahun mendatang diarahkan pada : (1) pengembangan industri yang mengolah sumberdaya lokal agar bernilai tambah tinggi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung alam; (2) pengembangan industri yang memperkuat kemampuan perekonomian daerah dengan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi; (3) pengembangan industri yang mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global; dan (4) pengembangan industri yang

memperkuat ketahanan ekonomi daerah yaitu yang memiliki keterkaitan dengan potensi dan aktivitas ekonomi lokal serta keterkaitan antar industri.

Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian daerah, pembangunan industri dilaksanakan dengan menciptakan lingkungan usaha mikro yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar: (1) pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulu, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik berupa transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana dan sarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

Jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan, dikembangkan agar secara efektif mampu mendukung peningkatan produksi dan produktivitas serta daya saing perekonomian daerah dengan

menerapkan sistem dan standar pengelolaan terbaik, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian; penguasaan dan pemanfaatan teknologi; serta mendukung upaya pengembangan perekonomian perdesaan.

6. Perdagangan diarahkan untuk mendukung perekonomian agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi. Upaya tersebut diselenggarakan melalui: (a) perkuatan posisi daerah dalam kerja sama perdagangan regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor sekaligus mengamankan kepentingan strategis dalam pengentasan kemiskinan, pengembangan perdesaan, dan perlindungan aktivitas perekonomian dari persaingan dan praktik perdagangan yang tidak sehat; dan (b) pengembangan citra dan standar produk barang dan jasa yang berkualitas sesuai standar mutu serta fasilitasi perdagangan yang berdaya saing.
7. Perdagangan juga diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan: (a) berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian di daerah dan terbangunnya kesadaran

penggunaan produksi lokal, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga yang terjangkau.

8. Pembangunan kepariwisataan diarahkan agar mampu mendorong perekonomian daerah, perluasan kesempatan kerja berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan citra daerah. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi lokal yang dapat mendorong perekonomian daerah, serta terkait dengan pengembangan budaya daerah. Berkembangnya sektor pariwisata diharapkan akan mampu menjadi *primemover* perekonomian daerah karena sektor pariwisata akan mendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, industri, dan berbagai kegiatan dalam sektor jasa.
9. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi termasuk usaha pertanian rakyat diarahkan sebagai implementasi pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka mendorong perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita riil yang terdistribusi secara merata. Pengembangan

UMKM dan koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis iptek, dan berdaya saing dengan produk impor khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktur dan memperkuat perekonomian daerah. Untuk itu, pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.

Koperasi didorong supaya semakin berkembang luas, semakin kuat dan efektif agar dapat semakin berperan dalam memperkuat perekonomian rakyat dan betul-betul menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik selaku produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi,

sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

10. Pengembangan sektor keuangan diarahkan agar senantiasa mampu memberikan kontribusi dalam penyediaan dana bagi pembiayaan pembangunan pada umumnya dan pembiayaan usaha pada khususnya, melalui pengembangan jangkauan pelayanan jasa keuangan di seluruh wilayah terutama peningkatan kontribusi berbagai jenis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam pendanaan pembangunan dan pembiayaan usaha ekonomi rakyat. Perhatian khusus akan diberikan kepada lembaga keuangan mikro yang dikelola masyarakat termasuk berbagai jenis Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam (KSP-USP). Dengan demikian, setiap jenis investasi (baik jangka pendek maupun jangka panjang) akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya

lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan anggaran yang tersedia. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, perlu peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu perlu peningkatan intensitas pendayagunaan potensi penerimaan daerah tanpa mengakibatkan tambahan beban bagi masyarakat. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah peningkatan intensitas pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan publik baik dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana sosial serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi

11. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya serta aman, merata, dan terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan potensi keragaman lokal.

## **E. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah**

Pembangunan prasarana dan sarana wilayah sangat penting dalam rangka menunjang dan mendorong intensitas pembangunan di segala bidang. Arah pembangunan prasarana dan sarana wilayah adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan prasarana transportasi diarahkan untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan pergerakan orang serta distribusi barang dan jasa dalam rangka mendukung dan mendorong aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. khususnya dalam mendorong transaksi perdagangan dan proses produksi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana jalan dan jembatan; perluasan jaringan pelayanan angkutan; peningkatan penyediaan dan kualitas sarana pendukung lalu lintas; peningkatan manajemen lalu lintas; serta dengan menciptakan dan menyelaraskan regulasi sesuai kewenangan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa transportasi dan menyusun cetak biru Tata Transportasi Wilayah.
2. Pembangunan sumberdaya air diarahkan untuk menjamin ketersediaan air, khususnya untuk kegiatan pertanian secara umum, yang menjamin ketahanan pangan; mengembangkan

kelembagaan lokal pengelolaan sumberdaya air yang mampu mengembangkan konsep gotong royong dalam pengelolaan sumber daya air terutama yang terkait dengan irigasi; meningkatkan upaya konservasi sumberdaya air melalui pelestarian sumber air; peningkatan pengawasan atas pengambilan air dan penggunaannya agar tetap mempertimbangkan kepentingan konservasi; menerapkan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong upaya konservasi sumberdaya air; meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah air; mendorong upaya pelestarian daerah resapan air antara lain melalui penerapan ketentuan penggunaan lahan sesuai peruntukannya; dan mengupayakan keterpaduan rencana tata ruang dengan potensi dan pengembangan sumberdaya air; memperbaiki pola pendayagunaan sumberdaya air; meningkatkan upaya pengendalian daya rusak air; serta meningkatkan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolaan sumberdaya air.

3. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada: (1) pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan keandalannya untuk meningkatkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga yang memadai dan mampu menjamin kualitas pelayanan untuk mendukung kegiatan investasi; (2)

peningkatan fasilitasi pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik; serta (3) diversifikasi energi untuk pembangkit listrik.

4. Pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk menjadi wahana yang dapat diandalkan guna terselenggaranya arus berita, informasi, dan data baik lokal, regional, nasional, maupun internasional secara lancar, jelas, dan cepat untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi.
5. Pembangunan telematika diarahkan pada penetapan *platform* kompetisi jangka panjang dalam penyelenggaraan telekomunikasi; optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana telematika dan prasarana nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi; serta pengembangan industri konten dan aplikasi sebagai upaya penciptaan nilai tambah informasi.
6. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung secara memadai bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan yang didukung dengan kebijakan dan program penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan,

efisien, dan akuntabel serta terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh; meningkatkan alokasi cadangan lahan untuk kebutuhan perumahan terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah; dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan perumahan; mendorong pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA); serta mendorong dan mengarahkan pembangunan perumahan pada kawasan *fringe* dalam rangka memacu munculnya pusat pertumbuhan baru, dengan mengoptimalkan fungsi tata ruang daerah.

Pengembangan budaya hidup bersih harus terus digalakan dengan didukung oleh segenap aparatur pemerintah, swasta/dunia usaha, lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat. Manajemen pengelolaan sampah harus terus dikembangkan dalam rangka mengeliminir dampak negatif yang ditimbulkannya bagi lingkungan hidup melalui perbaikan penanganan mulai dari tingkat rumah tangga dan aktivitas penghasil sampah lainnya; pengambilan dan pengumpulan; pengangkutan; penampungan akhir dan pengolahan menjadi bahan yang bermanfaat serta menghasilkan limbah akhir yang tidak berbahaya atau merusak fungsi lingkungan hidup.

7. Pengembangan wilayah khususnya wilayah-wilayah tertinggal diarahkan untuk meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dalam rangka mengurangi disparitas kesejahteraan penduduk dan perkembangan antar wilayah khususnya antara wilayah perdesaan dan perkotaan antara lain melalui penyediaan infrastruktur penunjang berupa prasarana sosial dan ekonomi.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi antar sektor, serta antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas

ekonomi dengan kabupaten tetangga untuk mendorong aliran sumberdaya dari wilayah tetangga dalam rangka peningkatan dinamika sosial dan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas serta kualitas prasarana dan sarana sosial ekonomi di wilayah perbatasan dengan mengembangkan koordinasi dan sinergi dengan wilayah tetangga.

8. Pembangunan tata ruang diarahkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan lahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang yang ideal dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan lahan dan ruang; mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup; mengurangi dampak negatif pemanfaatan ruang terhadap bidang sosial dan ekonomi; mendorong aktivitas sosial dan ekonomi; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konflik pemanfaatan ruang antar sektor sering terjadi antara lain sebagai akibat karena pembangunan yang dilakukan tersebut belum menggunakan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang harus disusun secara cermat dan dimanfaatkan secara konsisten sebagai landasan dan acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis,

serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hirarkis dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Pembangunan bidang pertanahan dilaksanakan dengan menerapkan catur tertib pertanahan dalam rangka menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang tertib, efisien dan efektif, melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi, serta mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pemanfaatan lahan.

Kerjasama antar daerah terutama dengan Kabupaten tetangga perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam pendayagunaan dan pemasaran potensi daerah. Melalui kerjasama antar daerah, dengan adanya koordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya di wilayah perbatasan, akan dapat dihindari adanya overlaping dan duplikasi atau bahkan berbenturan kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga akan dapat dihindari pemborosan sumberdaya pembangunan; sebaliknya akan dapat ditingkatkan manfaat dan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah yang bertetangga

akibat adanya efek eksternalitas sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan.

Sementara itu, pendayagunaan dan pemasaran berbagai potensi yang dimiliki masing-masing daerah dapat dikerjasamakan di mana potensi yang sama yang kapasitasnya terbatas dapat digabung dalam pendayagunaan dan pemasarannya, sedang potensi yang berbeda dapat saling melengkapi. Dengan adanya kerjasama antar daerah, maka pendayagunaan serta upaya promosi dan pemasaran potensi daerah akan menjadi semakin efisien dan efektif.

## **F. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup akan sangat menentukan kualitas kehidupan manusia. Kondisi lingkungan hidup yang sehat akan memberikan kenyamanan sekaligus mampu mendukung kehidupan manusia dengan baik. Sebaliknya kondisi lingkungan hidup yang kurang sehat atau rusak akan memberi pengaruh buruk dan menjadikan kehidupan manusia menjadi tidak nyaman. Bahkan tanpa didukung dengan kondisi lingkungan yang memadai kemungkinan pada suatu saat manusia tidak akan dapat lagi menyelenggarakan kehidupannya.

Meskipun pada saat ini kondisi lingkungan hidup masih mampu mendukung kehidupan manusia tetapi disadari bahwa kualitas lingkungan hidup terus mengalami penurunan yang antara lain ditandai dengan gejala meningkatnya pemanasan global; terjadinya bencana alam yang silih berganti seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan; pergeseran pola musim, meningkatnya permukaan air laut; menurunnya kekayaan plasma nutfah; serta berkembangnya berbagai jenis penyakit baik yang menyerang manusia maupun tanaman serta hewan, dan sebagainya.

Terus meningkatnya populasi penduduk dari waktu ke waktu dengan sendirinya akan mengakibatkan desakan terhadap lingkungan hidup akibat eksploitasi yang terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di sisi lain, berbagai aktivitas manusia akan menimbulkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang terlanjur mengalami degradasi akan sangat sulit untuk dikembalikan agar kondisi dan fungsinya dapat pulih seperti sediakala. Di samping membutuhkan nilai investasi yang sangat besar yang mungkin melampaui nilai yang diambil dari hasil eksploitasi sumberdaya alam yang telah dilakukan manusia, bagaimanapun upaya rehabilitasi tidak akan mampu mengembalikan kondisi dan fungsi lingkungan hidup sebagaimana sediakala. Oleh karena itu upaya yang paling tepat dalam rangka

pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah melalui pemeliharaan serta pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Hal itu akan memungkinkan dilaksanakan secara efektif apabila seluruh komponen masyarakat dan pemerintah telah memiliki kesadaran tentang arti penting pelestarian fungsi lingkungan hidup antara lain dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah. Sedangkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang telah terlanjur mengalami kerusakan, harus dilakukan upaya rehabilitasi.

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dalam kurun waktu 20 tahun ke depan meliputi :

1. Perbaiki pendayagunaan SDA terbarukan seperti hutan, pertanian (tanaman), peternakan (hewan ternak), dan perairan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan sebagian

diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

2. Perbaiki pengelolaan SDA tak terbarukan melalui pengendalian pemanfaatan bahan tambang, mineral dan sebagainya sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup maupun dampak langsung yang merugikan bagi kepentingan kehidupan manusia saat ini seperti kerusakan berbagai infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, dan prasarana pengairan lainnya) erosi tebing sungai yang mengakibatkan kehilangan lahan budidaya atau permukiman, dan sebagainya. Pemanfaatan bahan tambang dan mineral sejauh mungkin diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini sebagian digunakan bagi upaya reklamasi dan konservasi.
3. Penganekaragaman sumber energi dan konservasi energi dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup antara lain melalui upaya pengembangan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Pengembangan energi juga

dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi yang optimum bagi tiap jenis energi.

4. Perbaiki pengelolaan sumber daya air untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; memperkuat kelembagaan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
5. Diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut pasar. Arahan ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis SDA, di samping tetap menekankan pada pemeliharaan SDA yang ada, juga sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan SDA yang ada di wilayahnya. Dengan demikian

pembangunan ke depan tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.

6. Pengembangan SDA yang khas pada setiap wilayah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas SDA. Untuk itu diperlukan adanya rencana tata ruang wilayah yang mantap dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjadi pedoman pemanfaatan SDA secara optimal dan lestari.
7. Pembangunan berwawasan lingkungan dengan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi

masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.

8. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan produksi yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
9. Peningkatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; serta perluasan penerapan etika lingkungan; agar lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, serta dengan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

10. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup terutama bagi generasi muda untuk mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **4.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025**

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga sebagai kondisi ideal kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat diwujudkan melalui upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 ini dirumuskan agenda pembangunan yang dibagi berdasarkan tahapan lima tahunan dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada setiap periode lima tahun sesuai masa jabatan Bupati. Untuk selanjutnya, RPJM tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Tahapan dan skala prioritas pembangunan limatahunan mencerminkan tujuan jangka menengah yang akan dicapai yang secara akumulatif dan berkesinambungan akan mendorong

terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam jangka panjang. Substansi setiap tahapan pembangunan merupakan garis besar kebijakan yang harus ditempuh dalam jangka waktu lima tahun sesuai tujuan yang hendak dicapai dan akan menjadi dasar serta menunjang kebijakan dan tujuan pada tahapan berikutnya. Atas dasar itu, tahapan dan skala prioritas utama pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut :

#### **4.3.1. RPJMD I (Tahun 2005-2010)**

Dalam RPJMD pertama, pembangunan Kabupaten Purbalingga ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, membangun fondasi perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dengan ditunjang melalui penyediaan berbagai prasarana sosial dan ekonomi yang vital bagi peningkatan aksesibilitas dan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat serta meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

##### **4.3.1.1 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur melalui Diklat teknis, fungsional, dan struktural dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

2. Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundangan dan kebutuhan.
3. Peningkatan kualitas sistem administrasi pemerintahan daerah melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan.
4. Penataan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dengan memadukan perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas serta peningkatan kemampuan aparatur pemerintah sampai dengan tingkat desa/kelurahan dalam perencanaan pembangunan.
5. Pengembangan jejaring kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan akses sumberdaya bagi akselerasi pembangunan serta peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan efesisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan serta pendayagunaan potensi daerah.
6. Penertiban administrasi pertanahan dan pengendalian pemanfaatan lahan melalui program catur tertib pertanahan serta identifikasi aset tanah dan penertiban administrasi pertanahan milik Pemerintah Daerah.

#### **4.3.1.2 Mewujudkan Purbalingga yang Aman Damai dan Demokratis Berdasarkan Hukum**

1. Penanaman dan pengembangan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum melalui pendidikan formal, non formal, dan informal serta berbagai bidang kehidupan masyarakat.
2. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.
3. Penumbuhan dan pengembangan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis.
4. Peningkatan peran dan fungsi lembaga politik melalui fasilitasi lembaga-lembaga politik serta peningkatan kesadaran politik rakyat.

#### **4.3.1.3 Mewujudkan Manusia Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Beretika, Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme serta Cinta Tanah Air.**

1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada upaya untuk menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2. Fasilitasi penelitian dan pengembangan IPTEK terutama yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendorong laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
3. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada upaya untuk menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan Penanganan PMKS dengan menitik beratkan pada identifikasi, pendataan, dan updating data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan upaya penanganan PMKS.
5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.
6. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan menitikberatkan pada stimulasi prakarsa, swadaya dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui pengembangan dan peningkatan efektifitas upaya pemberdayaan masyarakat di bidang sosial

dan ekonomi serta pengembangan dan revitalisasi kelembagaan masyarakat.

7. Peningkatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan serta perlindungan anak melalui pengarusutamaan gender dan hak-hak anak
8. Penanaman semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui pengenalan pluralitas sosial, budaya, dan geografis negara Indonesia serta internalisasi nilai-nilai nasionalisme terutama bagi generasi muda dalam pendidikan formal, non formal dan informal termasuk dalam kehidupan sehari-hari.

#### **4.3.1.4 Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan**

1. Penumbuhan potensi dan peningkatan daya saing UMKM berbasis potensi lokal dan berorientasi pasar.
2. Menumbuhkembangkan koperasi dan lembaga keuangan masyarakat untuk mendorong perekonomian rakyat.
3. Pengembangan industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menitik beratkan pada industri padat karya, memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dan ramah lingkungan.

4. Penciptaan lingkungan bisnis (business environment) yang kondusif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan investasi dengan menitikberatkan pada kemudahan pelayanan perizinan, peningkatan penyediaan infrastruktur penunjang, kemudahan akses terhadap lahan usaha serta kepastian usaha.
5. Menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta meningkatkan perlindungan konsumen dan peningkatan peran usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah antara lain melalui modernisasi pasar tradisional dan fasilitasi pedagang.
6. Penumbuhan dan Pengembangan potensi wisata inovatif yang memiliki nilai jual dalam upaya untuk mewujudkan peran pariwisata sebagai primemover perekonomian daerah.
7. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (enterpreneur).
8. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan) dengan focus peningkatan sarana prasarana dan pelayanan penyaluran

sarana produksi untuk meletakkan fondasi yang kokoh dalam rangka pengembangan agribisnis.

9. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat.

#### **4.3.1.5 Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah**

1. Peningkatan penyediaan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi dengan menitik beratkan kepada penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan sosial dan wilayah pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan Tata Kelola Transportasi Lokal dengan menitikberatkan pada Peningkatan kuantitas,kualitas dan kapasitas sarana prasarana transportasi.
3. Peningkatan pemanfaatan Telekomunikasi dan Informatika dalam berbagai sektor dengan menitikberatkan pada penyempurnaan regulasi untuk pengembangan infrastruktur TI.
4. Peningkatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta pengembangan kelembagaan pengelolaan air

5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik.
6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat yang didukung dengan kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembayaran perumahan jangka panjang antara lain melalui kerjasama dengan swasta.
7. Peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan mengurangi permukiman kumuh.
8. Penataan kawasan perkotaan dan peningkatan penyediaan prasarana pelayanan umum dan ruang publik untuk mewujudkan kota yang mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi , tertib, sehat, indah, dan nyaman.
9. Peningkatan pengembangan wilayah-wilayah tertinggal, wilayah-wilayah cepat tumbuh dan wilayah-wilayah strategis serta wilayah perbatasan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi untuk meningkatkan sinergi perkembangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.

10. Pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang.

#### **4.3.1.6 Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

1. Perbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis secara terpadu berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
2. Peningkatan inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka pengembangan basis data dan informasi lingkungan
3. Pengembangan sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan stakeholders terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
4. Peningkatan sosialisasi dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana

#### **4.3.2. RPJMD II (Tahun 2010-2015)**

Dalam RPJMD kedua, pembangunan Kabupaten Puringga ditekankan pada upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan

sosial dasar yang semakin berkualitas, memperkokoh perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dengan ditunjang penyediaan berbagai prasarana sosial dan ekonomi yang semakin meningkat kapasitas dan kualitasnya serta dengan semakin mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **4.3.2.1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur sesuai bidang tugas, peningkatan disiplin aparatur dengan penerapan *reward and punishment* secara konsisten, dan pengembangan sistem pembinaan karir pegawai negeri berbasis *meryt system*.
2. Penyesuaian kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan intensitas dan kualitas sistem pemantauan pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum.

4. Peningkatan kualitas dan efektivitas kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan akses sumberdaya bagi akselerasi pembangunan serta peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah untuk semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan serta pendayagunaan potensi daerah.
5. Peningkatan kualitas administrasi pertanahan dan pengendalian pemanfaatan lahan melalui program catur tertib pertanahan serta peningkatan kualitas administrasi aset pertanahan milik Pemerintah Daerah.

#### **4.3.2.2. Mewujudkan Purbalingga yang Aman Damai dan Demokratis Berdasarkan Hukum**

1. Peningkatan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum melalui peningkatan penanaman nilai-nilai yang sesuai dalam pendidikan formal, non formal, dan informal serta berbagai bidang kehidupan masyarakat.
2. Peningkatan pemeliharaan dan keamanan dan ketertiban umum.

3. Peningkatan kualitas kehidupan politik melalui peningkatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum.
4. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga politik melalui fasilitasi akses rakyat terhadap pengambilan kebijakan politik.

#### **4.3.2.3. Mewujudkan Manusia Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Beretika, Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme serta Cinta Tanah Air.**

1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada upaya untuk menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan kualitas pendidikan dasar 9 tahun sesuai standar nasional.
2. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK terutama yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendorong laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

3. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas upaya kesehatan perorangan, kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan.
4. Peningkatan Penanganan PMKS dengan menitik beratkan pada pengembangan sistem identifikasi, pendataan, dan updating data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta sistem penanganan PMKS melalui pengembangan sistem jaminan sosial.
5. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada peningkatan kemandirian kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta peningkatan kualitas keluarga.
6. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan menitikberakan pada peningkatan prakarsa, swadaya dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui inovasi upaya pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi serta peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan masyarakat.
7. Peningkatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan serta perlindungan anak melalui peningkatan pengarusutamaan gender dan hak-hak anak.

8. Peningkatan semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui penghayatan kebinekaan sosial, budaya, dan geografis negara Indonesia serta peningkatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme terutama bagi generasi muda dalam pendidikan formal, non formal dan informal termasuk dalam kehidupan sehari-hari.
9. Peningkatan upaya pelestarian dan internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa secara terintegrasi dengan pendidikan formal serta dalam kehidupan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas moral, etika dan karakter masyarakat serta peningkatan apresiasi masyarakat serta pelestarian dan pengembangan seni dan budaya nasional serta situs dan benda-benda cagar budaya.
10. Peningkatan pendidikan moral keagamaan untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan dan penghayatan ajaran agama guna mewujudkan perilaku dan sikap hidup masyarakat sesuai nilai ajaran agama, memantapkan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etik dalam segala aspek kehidupan, serta mewujudkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama.

#### **4.3.2.4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan**

1. Peningkatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta akses pasar melalui peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta pemanfaatan teknologi informasi.
2. Peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen.
3. Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan industri padat karya, memanfaatkan potensi sumberdaya lokal, memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan untuk semakin meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
4. Penciptaan lingkungan bisnis (business environment) yang semakin kondusif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan investasi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sistem pelayanan perizinan, peningkatan penyediaan dan kualitas infrastruktur penunjang, kemudahan akses terhadap lahan usaha serta kepastian usaha.
5. Menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta meningkatkan perlindungan konsumen dan peningkatan peran usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah

antara lain melalui modernisasi pasar tradisional dan fasilitasi pedagang kecil.

6. Peningkatan kapasitas, kualitas dan promosi obyek-obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan sehingga akan semakin meningkatkan perannya sebagai primemover perekonomian daerah.
7. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (enterpreneur).
8. Pengembangan agribisnis dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu meningkatkan daya saing.
9. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang aman dan terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat.

#### **4.3.2.5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah**

1. Peningkatan penyediaan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi dengan menitik beratkan kepada penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah.

2. Peningkatan Tata Kelola Transportasi Lokal dengan menitikberatkan pada Revitalisasi prasarana transportasi serta Fasilitasi pengembangan moda transportasi udara.
3. Peningkatan dan perluasan pemanfaatan Telekomunikasi dan Informatika dalam berbagai sektor dengan menitikberatkan pada penyempurnaan regulasi dan pengembangan infrastruktur TI hingga ke wilayah perdesaan.
4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik serta pengembangan pembangkit listrik alternatif.
5. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat dengan melanjutkan kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembayaran perumahan jangka panjang antara lain melalui kerjasama dengan swasta serta penyediaan cadangan lahan untuk permukiman.
6. Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan semakin mengurangi permukiman kumuh.
7. Peningkatan penataan kawasan perkotaan dan peningkatan penyediaan prasarana pelayanan umum dan ruang publik untuk mewujudkan kota yang semakin mampu mengakomodasi dan

mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman.

8. Peningkatan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh serta wilayah perbatasan untuk mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi untuk semakin meningkatkan perkembangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.
9. Optimalisasi fungsi kawasan sesuai perencanaan tata ruang yang telah disusun melalui evaluasi kondisi existing pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya secara berkala; evaluasi dan atau revisi dokumen perencanaan pemanfaatan ruang berdasarkan kondisi existing pemanfaatan ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta penyusunan dokumen penataan ruang kawasan-kawasan khusus.
10. Melanjutkan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang.

#### **4.3.2.6. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

1. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan dalam

rangka rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.

2. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya genetik.
3. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan.
4. Pengembangan dan penerapan teknologi sederhana dalam rangka pengurangan risiko bencana.

#### **4.3.3. RPJMD III (Tahun 2015-2020)**

RPJMD ketiga sebagai kelanjutan dan hasil dari pelaksanaan RPJMD Pertama dan RPJMD Kedua dilaksanakan untuk semakin memantapkan pembangunan secara keseluruhan yang ditandai dengan semakin mantapnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan dan papan yang layak bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan menengah yang semakin berkualitas; tersedianya infrastruktur ekonomi dan sosial dengan kapasitas dan

kualitas yang memadai; terciptanya kehidupan sosial dan politik yang semakin harmonis dan dinamis; serta serta kehidupan ekonomi yang tumbuh secara dinamis dengan partisipasi seluruh masyarakat dalam proses produksi dan pendapatan per kapita yang semakin baik dan merata.

#### **4.3.3.1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**

1. Penguatan profesionalisme aparatur antara lain melalui penguatan pembinaan karir PNS berdasarkan *meryt system* untuk semakin mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, pemantauan pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
4. Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai fihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai dengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah untuk

semakin meningkatkan efesisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan serta pendayagunaan potensi daerah.

5. Penguatan sistem administrasi pertanahan dan pengendalian pemanfaatan lahan melalui pemantapan progam catur tertib pertanahan.

#### **4.3.3.2. Mewujudkan Purbalingga yang Aman Damai dan Demokratis Berdasarkan Hukum**

1. Penguatan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum dengan semakin menguatkan penanaman dan pengembangan nilai-nilai yang sesuai dalam pendidikan formal, non formal, dan informal serta berbagai bidang kehidupan masyarakat.
2. Penguatan sistem pemeliharaan dan keamanan dan ketertiban umum.
3. Penguatan dan pemeliharaan kualitas kehidupan politik melalui penguatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum.
4. Penguatan peran dan fungsi lembaga politik serta penguatan kesadaran politik rakyat melalui peningkatan peran politik rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan politik.

#### **4.3.2.3. Mewujudkan Manusia Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Beretika, Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme serta Cinta Tanah Air.**

1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan menengah dan penguatan kualitas pelayanan pendidikan dasar 9 tahun sesuai standar nasional.
2. Penguatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK yang relevan serta pengembangan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
3. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada penguatan kualitas upaya kesehatan perorangan, kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman.
4. Peningkatan Penanganan PMKS dengan menitikberatkan pada penguatan sistem identifikasi, pendataan, dan updating data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta penguatan sistem jaminan sosial.

5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada penguatan kemandirian kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta penguatan kualitas keluarga.
6. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan menitikberakan pada penguatan prakarsa, swadaya dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan inovasi upaya pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi serta penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan masyarakat.
7. Peningkatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan serta perlindungan anak melalui penguatan pengarusutamaan gender dan hak-hak anak.
8. Penguatan semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui penghayatan kebinekaan sosial, budaya, dan geografis negara Indonesia serta penguatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme terutama bagi generasi muda dalam pendidikan formal, non formal dan informal termasuk dalam kehidupan sehari-hari.
9. Peningkatan upaya pelestarian dan internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa secara terintegrasi dengan pendidikan formal serta dalam kehidupan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas moral, etika dan karakter masyarakat serta peningkatan apresiasi masyarakat serta pelestarian dan pengembangan seni dan budaya nasional serta situs dan benda-benda cagar budaya.

10. Peningkatan pendidikan moral keagamaan untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan dan penghayatan ajaran agama guna mewujudkan perilaku dan sikap hidup masyarakat sesuai nilai ajaran agama, memantapkan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etik dalam segala aspek kehidupan, serta mewujudkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama.

#### **4.3.3.4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan**

1. Penguatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta akses pasar melalui pemanfaatan R & D dalam peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta pemanfaatan teknologi informasi.
2. Penguatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen.
3. Penguatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis teknologi dan penumbuhan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi, ramah lingkungan, serta berperan besar dalam peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat.

4. Penguatan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utama investasi dengan memantapkan kondusivitas lingkungan bisnis.
5. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta memperkuat usaha perdagangan yang menjadi katalisator perekonomian daerah untuk memantapkan perdagangan skala regional.
6. Penguatan kapasitas dan kualitas obyek-obyek wisata untuk menjadikan Purbalingga sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama Regional.
7. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (enterpreneur).
8. Pengembangan agribisnis melalui peningkatan efisiensi, modernisasi, dan *value creation* usaha pertanian dalam arti luas.
9. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang aman, berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

#### **4.3.3.5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah**

1. Peningkatan penyediaan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi dengan menitik beratkan kepada peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah.
2. Peningkatan Tata Kelola Transportasi Lokal dengan menitikberatkan pada Pengembangan jaringan transportasi lokal dan pengembangan moda transportasi udara
3. Peningkatan dan perluasan pemanfaatan Telekomunikasi dan Informatika dalam berbagai sektor melalui penyempurnaan regulasi dan pengembangan infrastruktur TI hingga ke wilayah terpencil.
4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik serta pengembangan pembangkit listrik alternatif.
5. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat dengan melanjutkan kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembayaran perumahan jangka panjang antara lain melalui kerjasama dengan swasta serta penyediaan cadangan lahan untuk permukiman.

6. Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan semakin mengurangi permukiman kumuh.
7. Peningkatan penataan kawasan perkotaan dan peningkatan penyediaan prasarana pelayanan umum dan ruang publik untuk mewujudkan kota yang semakin mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman.
8. Peningkatan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh serta wilayah perbatasan untuk mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi untuk semakin meningkatkan perkembangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.
9. Optimalisasi fungsi kawasan sesuai perencanaan tata ruang yang telah disusun melalui evaluasi kondisi existing pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya secara berkala; evaluasi dan atau revisi dokumen perencanaan pemanfaatan ruang berdasarkan kondisi existing pemanfaatan ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta penyusunan dokumen penataan ruang kawasan-kawasan khusus.

10. Melanjutkan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang.

#### **4.3.3.6. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

1. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya
2. Pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.
4. Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana

#### **4.3.4. RPJMD IV (Tahun 2020-2025)**

RPJMD keempat sebagai kelanjutan dan hasil dari pelaksanaan RPJMD Pertama, RPJMD Kedua dan RPJMD Ketiga dilaksanakan untuk semakin memantapkan pembangunan secara keseluruhan yang ditandai dengan semakin mantapnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan dan papan yang layak bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan

kesehatan yang lebih berkualitas bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan menengah yang semakin berkualitas; tersedianya infrastruktur ekonomi dan sosial dengan kapasitas dan kualitas yang memadai; terciptanya kehidupan sosial dan politik yang semakin harmonis dan dinamis; serta kehidupan ekonomi yang tumbuh secara dinamis dengan partisipasi seluruh masyarakat dalam proses produksi dan pendapatan per kapita yang semakin baik dan merata.

#### **4.3.4.1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**

1. Pemantapan profesionalisme aparatur untuk memperkuat terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pemantapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, pemantauan pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
4. Pemantapan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai

dengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah untuk semakin meningkatkan efesisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan serta pendayagunaan potensi daerah.

5. Pemantapan sistem administrasi pertanahan dan pengendalian pemanfaatan lahan melalui pemantapan progam catur tertib pertanahan.

#### **4.3.3.2. Mewujudkan Purbalingga yang Aman Damai dan Demokratis Berdasarkan Hukum**

1. Pemantapan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum dengan semakin menguatkan penanaman dan pengembangan nilai-nilai yang sesuai dalam pendidikan formal, non formal, dan informal serta berbagai bidang kehidupan masyarakat.
2. Pemantapan sistem pemeliharaan dan keamanan dan ketertiban umum.
3. Pemantapan dan pemeliharaan kualitas kehidupan politik melalui penguatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum.

4. Pemantapan peran dan fungsi lembaga politik serta penguatan kesadaran politik rakyat melalui peningkatan peran politik rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan politik.

#### **4.3.3.3. Mewujudkan Manusia Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Beretika, Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme serta Cinta Tanah Air.**

1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada penguatan kualitas pendidikan menengah dan pemantapan kualitas pendidikan pendidikan dasar 9 tahun sesuai standar nasional.
2. Pemantapan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK yang relevan serta pengembangan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
3. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada pemantapan kualitas upaya kesehatan perorangan, kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta pemantapan kualitas lingkungan pemukiman dan penguatan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.

4. Peningkatan Penanganan PMKS dengan pemantapan sistem jaminan sosial.
5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada pemantapan kemandirian kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta pemantapan kualitas keluarga.
6. Pemantapan prakarsa, swadaya, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di segala bidang.
7. Pemantapan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan serta perlindungan anak.
8. Pemantapan semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui penghayatan kebinekaan sosial, budaya, dan geografis negara Indonesia serta penguatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme terutama bagi generasi muda dalam pendidikan formal, non formal dan informal termasuk dalam kehidupan sehari-hari.
9. Peningkatan upaya pelestarian dan internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa secara terintegrasi dengan pendidikan formal serta dalam kehidupan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas moral, etika dan karakter masyarakat serta peningkatan apresiasi masyarakat serta pelestarian dan pengembangan seni dan budaya nasional serta situs dan benda-benda cagar budaya.

10. Peningkatan pendidikan moral keagamaan untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan dan penghayatan ajaran agama guna mewujudkan perilaku dan sikap hidup masyarakat sesuai nilai ajaran agama, memantapkan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etik dalam segala aspek kehidupan, serta mewujudkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama.

#### **4.3.4.4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan**

1. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.
2. Pemantapan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai lokomotif ekonomi rakyat.
3. Pemantapan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan peran industri berbasis teknologi dan industri kreatif yang ramah lingkungan dalam peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat.
4. Pemantapan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utama investasi dengan semakin memantapkan lingkungan bisnis.
5. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta memantapkan usaha perdagangan.

6. Pemantapan kapasitas dan kualitas obyek-obyek wisata untuk memantapkan Purbalingga sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama Regional.
7. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (*entrepreneur*).
8. Pemantapan Purbalingga sebagai pusat agribisnis di kawasan regional.
9. Pemantapan Ketahanan Pangan yang aman, terjangkau, berkualitas serta halal sesuai kaidah agama.

#### **4.3.4.5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah**

1. Peningkatan penyediaan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi melalui pemantapan kualitas dan kapasitas sarana prasarana untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah.
2. Pemantapan Sistem Transportasi Lokal dan moda transportasi udara.
3. Peningkatan pemanfaatan Telekomunikasi dan Informatika secara optimal dalam berbagai sektor kehidupan dengan jangkauan menyeluruh dan terpadu

4. Peningkatan manajemen pengelolaan dan konservasi sumberdaya air melalui peningkatan kelembagaan pengelolaan air dan pembangunan serta pemeliharaan bangunan irigasi dan pengairan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kelestarian pendayagunaan sumberdaya air.
5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik serta pengembangan pembangkit listrik alternatif.
6. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat dengan melanjutkan kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembayaran perumahan jangka panjang antara lain melalui kerjasama dengan swasta serta penyediaan cadangan lahan untuk permukiman.
7. Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan semakin mengurangi permukiman kumuh.
8. Peningkatan penataan kawasan perkotaan dan peningkatan penyediaan prasarana pelayanan umum dan ruang publik untuk mewujudkan kota yang semakin mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman.

9. Peningkatan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh serta wilayah perbatasan untuk mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi untuk semakin meningkatkan perkembangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.
10. Optimalisasi fungsi kawasan sesuai perencanaan tata ruang yang telah disusun melalui evaluasi kondisi existing pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya secara berkala; evaluasi dan atau revisi dokumen perencanaan pemanfaatan ruang berdasarkan kondisi existing pemanfaatan ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta penyusunan dokumen penataan ruang kawasan-kawasan khusus.
11. Melanjutkan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang.

#### **4.3.4.6. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

1. Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.

2. Pelestarian sumber daya genetik berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
4. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana

## **BAB V.**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, fihak-fihak yang terkait, dan masyarakat pada umumnya dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, RPJP ini harus menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Purbalingga serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sampai dengan tahun 2025. Apabila semua fihak terkait mengimplementasikan dokumen RPJP ini secara konsisten dalam dokumen perencanaan turunannya sampai ke tingkat paling rendah, maka diharapkan setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan akan memiliki benang merah dengan visi Kabupaten Purbalingga, sehingga selama kurun waktu 20 tahun ke depan diharapkan akan dapat diwujudkan visi tersebut.

RPJP Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 ini memuat garis-garis besar sasaran dan arah kebijakan pembangunan

yang harus ditempuh selama kurun waktu 20 tahun ke depan agar dapat diwujudkan kondisi ideal daerah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Purbalingga yaitu **PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA**. Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, maka selama kurun waktu berlakunya dimungkinkan terjadi berbagai perubahan kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal akibat dinamika dan perubahan kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Oleh karena itu, dimungkinkan adanya perubahan atau penyesuaian dokumen perencanaan ini dalam rangkaantisipasi atau merespon berbagai kemungkinan perubahan tersebut.

Adanya kecenderungan terus berkembangnya kebutuhan dan permasalahan yang harus dihadapi pemerintah antara lain akibat terus meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya standar kehidupan masyarakat, menyebabkan meningkatnya beban belanja pemerintah dari waktu ke waktu. Oleh arena itu, peranserta serta dukungan masyarakat dan semua fihak yang terkait dan *concerned* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah sangat dibutuhkan agar setiap arah kebijakan dan sasaran yang termuat dalam dokumen perencanaan ini dapat dilaksanakan dan dicapai sehingga secara bertahap akan dapat diwujudkan kondisi ideal sesuai Visi Kabupaten Purbalingga.